



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2021



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
2021**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 14 Januari 2022
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny Muhammad Faisal, S.St.Pi, S.Pi, M.Si
NIP. 19790502 200212 1 001

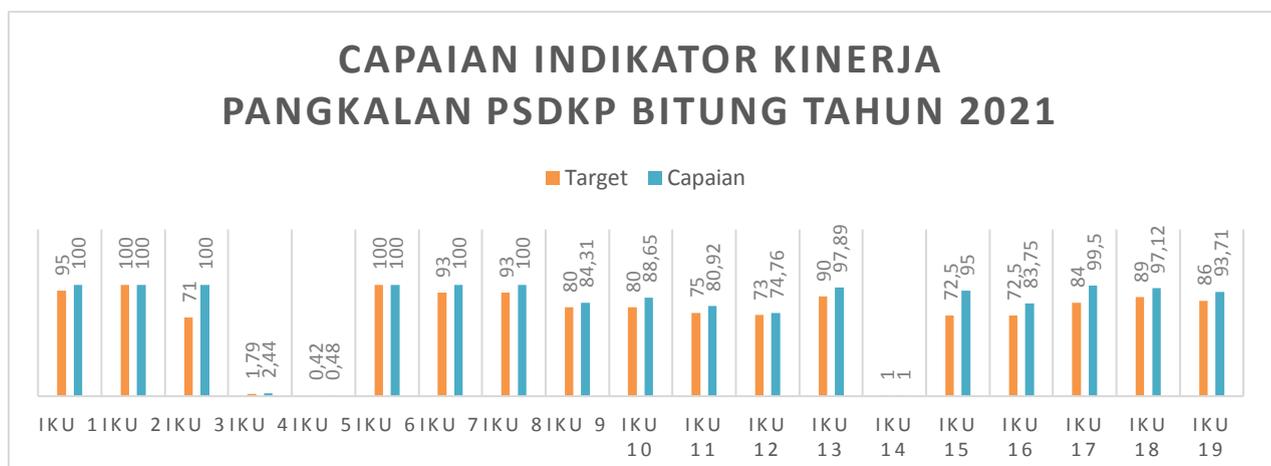
RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2021 pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 105,75 %. UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 mampu mencapai semua target kinerja.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp34,49 miliar dengan realisasi anggaran pada tahun 2021 Rp33,44 miliar atau 96,96%. Pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung yang melaksanakan untuk mendukung Program Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada kegiatan Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speed Boat serta kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan dan Pengawasan Pembudidayaan Ikan.

Berikut ini adalah grafis capaian Indikator Kinerja pada Pangkalan PSDKP Bitung



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	7
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Akuntabilitas Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Rekomendasi	102

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Revisi ke-2 Tahun 2021	10
Tabel 2	Perubahan Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	12
Tabel 3	Pengurangan Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	12
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 5	Tabel 5. Perbandingan Renstra 2020-2024 dengan PK 2021	18
Tabel 6	Analisis Efisiensi Capaian Kinerja tahun 2021	19
Tabel 7	Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung 2021	21
Tabel 8	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	21
Tabel 9	Perbandingan Capaian Kinerja IKU tahun 2020 dengan Capaian IKU 2021	23
Tabel 10	Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	43
Tabel 11	Realisasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2021	43
Tabel 12	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melalui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Tahun 2021	61
Tabel 13	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya bukan melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Tahun 2021	62
Tabel 14	Perbandingan target Tahun 2021 dengan Renstra tahun 2024	75
Tabel 15	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Tahun 2021	76
Tabel 16	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	76
Tabel 17	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2024	80
Tabel 18	Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	83
Tabel 19	Penanganan Awak Kapal di Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	86
Tabel 20	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW IV tahun 2021	89

Tabel 21	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW IV tahun 2021	90
Tabel 22	Hasil Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021	93
Tabel 23	Hasil penilaian Loba Inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2021	94
Tabel 24	Nilai IKPA dan NKA tahun 2021	98
Tabel 25	Nilai IKPA dan NKA tahun 2021	99
Tabel 26	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Rician Capaian Kinerja pada tiap triwulan Tahun 2021	15
Gambar 4	Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang	32
Gambar 5	Penilaian WBK tahun 2021	91
Gambar 6	Grafik Alokasi Anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2021	100

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada tahun 2021 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
 - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
 - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (bius dan bom ikan), penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
 - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
 - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
 - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
 - b. Eksploitasi mangrove.
 - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2022.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan PenangananPelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sepertidiuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

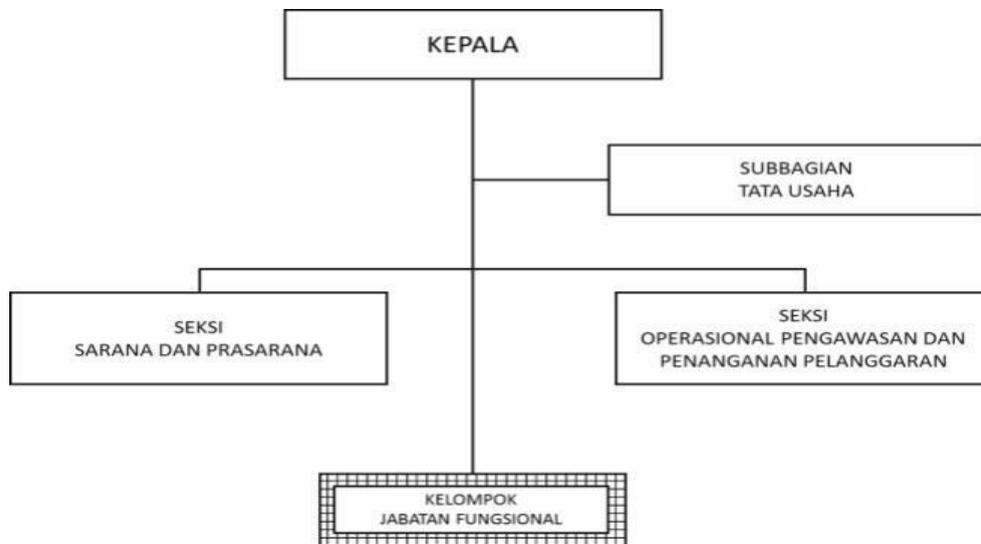
d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Dalam hal perubahan nomenklatur struktur organisasi Pangkalan PSDKP Bitung telah mengadopsi dan menerapkan susunan dan struktur organisasi yang baru berdasarkan Permen-KP Nomor 48/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang mana pimpinan unit kerja dibantu oleh Subkoordinator Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Sarana dan Prasarana dan kelompok jabatan fungsional. Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. Dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2021; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2021 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam RenstraKKP 2020 – 2024.

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (sovereignty) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

5. Peta Strategi dan Sasaran Kegiatan

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SK yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup SK yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup SK yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (value chain).

d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SK yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran Kegiatan merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2021 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat
 - b. Operasi Kapal Pengawas
 - c. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
 - d. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat
 - e. Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
 - b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
 - b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
 - c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
 - f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Layanan Perkantoran
 - b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - c. Layanan Umum
 - d. Layanan Sarana Internal
 - e. Layanan SDM
 - f. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

2.3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Revisi ke-2 Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,42
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100

6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	7. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		8. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik	9. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		11. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	73
		13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	84
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	86

Dalam pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, terjadi beberapa kali perubahan atau revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021, yaitu:

1. Revisi Perjanjian Kinerja bulan April 2021, disebabkan perubahan alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebelumnya Rp41.902.371.000 menjadi Rp45.404.975.000, atau penambahan anggaran senilai Rp. 3.502.604.000. Dengan Rincian sebagai berikut:
 - Penambahan Anggaran pada Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan senilai Rp. 3.541.004.000 untuk Alokasi Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Makassar dan *Docking* Kapal Pengawas
 - Pengurangan Anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen senilai Rp38.4000.000

2. Revisi Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2021 disebabkan perubahan target kinerja dan pengurangan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung dengan rincian sebagai berikut :

Table 2 Perubahan Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,82	0,42	Penghematan Anggaran

Table 3 Pengurangan Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

Indikator Kinerja	
Semula	Menjadi
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	(Target IKU di Hapus karena penghematan Anggaran)
Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)
Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerjaku* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

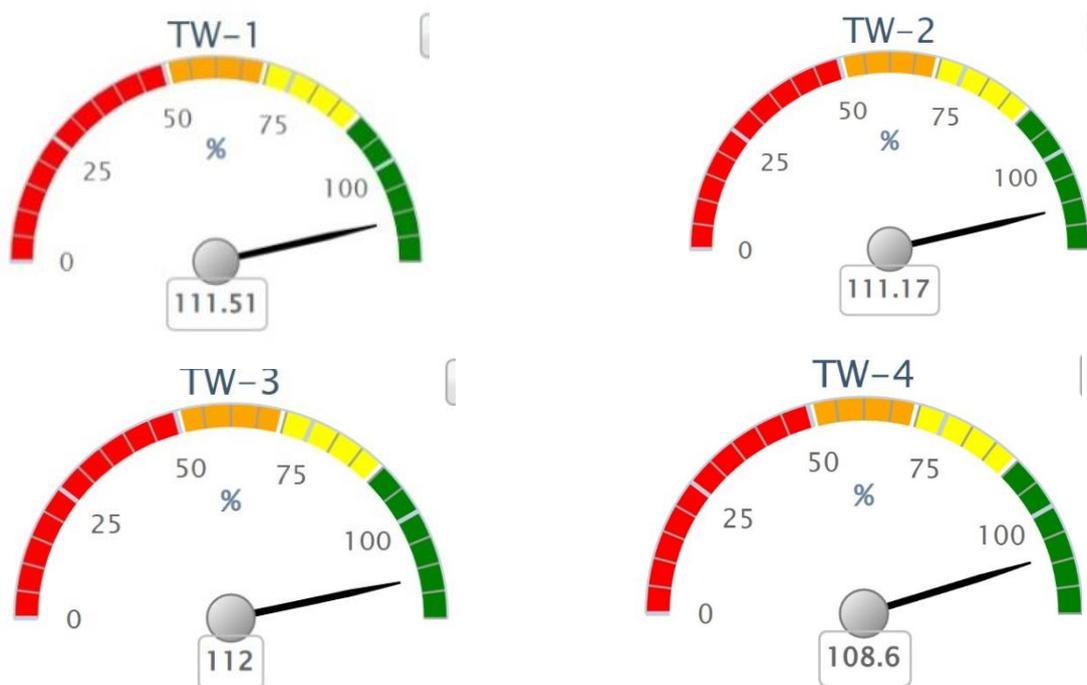
BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 108,60 dengan rincian capaian kinerja pada tiap triwulan sebagai berikut

Gambar 3. Rician Capaian Kinerja pada tiap triwulan Tahun 2021



Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 106,90% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2021 maka terdapat peningkatan sebesar 1,70%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja UPT sejenis pada tahun 2021 maka berdasarkan aplikasi kinerjaku.go.id, capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung berada di urutan ke 2 (dua) dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, dengan urutan sebagai berikut: Pangkalan PSDKP Jakarta (109,98), Pangkalan PSDKP Bitung (108,60), Pangkalan PSDKP Lampulo (107,86), Pangkalan PSDKP Batam (107,10), Pangkalan PSDKP Tual (106,26), dan Pangkalan PSDKP Benoa (104,11).

Pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2021	Target Desember	Capaian Desember	%
S.01	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan						105.26
IKS.01.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	95	95	100	105.26
S.02	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan						100.00
IKS.02.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	100	100	100	100.00
S.03	Terselenggaranya pengawasan 16system berbasis masyarakat						120.00
IKS.03.01	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	71	71	100	120.00
S.04	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP						117.15
IKS.04.01	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	1,79	1,79	2,44	120.00
IKS.04.02	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	0,42	0,42	0,48	114.29
S.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP						100.00
IKS.05.02	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	100	100	100	100.00
S.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan						107.54
IKS.06.01	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	93	93	100	107.53
IKS.06.02	Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	93	93	100	107.53
S.07	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung						110.30
IKS.07.10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	89	89	97,12	109.12

IKS.07.11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	86	86	93,71	108.97
IKS.07.01	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	80	80	84,31	105.39
IKS.07.02	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	80	80	88,65	110.81
IKS.07.03	Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	75	75	80,92	107.89
IKS.07.04	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	73	73	74,76	102.41
IKS.07.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	90	90	97,89	108.77
IKS.07.06	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INOVASI	Maximize	1	1	1	100.00
IKS.07.07	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	72,5	72,5	95	120.00
IKS.07.08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	72,5	72,5	83,75	115.52
IKS.07.09	Persentase unit kerja yang menerapkan 17system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	84	84	99,50	118.45

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 14 Januari 2022)

Warna	Keterangan
Baik	>= 100
Cukup	70 - < 100
Kurang	<70
Belum ada penilaian	
Belum Input Capaian	

Pada tahun 2021 Perjanjian Kinerja hanya sampai level 2 sehingga capaian kinerja level 3 dan 4 tidak dapat dibandingkan pada tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan reviu pada Rencana Strategis 2020-2024 karena ada beberapa target kinerja yang mengalami perubahan secara target dan nomenklatur. Berikut ini perbandingan Rencana Strategis 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021:

Tabel 5. Perbandingan Renstra 2020-2024 dengan PK 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	CAPAIAN PK	%	KETERANGAN
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan				
	1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	95	100	105,26	Melebihi Target Renstra
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan				
	2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat				
	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71	71	100	Tercapai
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP				
	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,79	2,44	120	Melebihi Target Renstra
	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,82	0,48	58,53	revisi realokasi anggaran mendukung kegiatan prioritas
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP				
	6. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100	-	-	IK dihapus
	7. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan				
	8. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	100	107,53	Melebihi Target Renstra
	9. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	100	107,53	Melebihi Target Renstra
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik				
	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80	84,31	105,39	Melebihi Target Renstra
	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80	88,65	110,81	Melebihi Target Renstra
	12. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75	80,92	107,89	Melebihi Target Renstra
	13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	73	74,76	102,41	Melebihi Target Renstra

14. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90	97,89	108,77	Melebihi Target Renstra
15. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1	1	100	Tercapai
16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5	95	120	Melebihi Target Renstra
17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5	83,75	115,52	Melebihi Target Renstra
18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	84	100	119,5	Melebihi Target Renstra
19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89	97,12	109,12	Melebihi Target Renstra
20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	86	93,71	108,97	Melebihi Target Renstra

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021, telah dilakukan pengukuran terhadap 19 (Sembilan belas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dan semua target indikator kinerja dapat tercapai $\geq 100\%$.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tentag Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 6. Analisis Efisiensi Capaian Kinerja tahun 2021 :

No.	Sasaran Kegiatan	Efiseinsi %
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	31,5
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	1,9
3	Terselenggaranya pengawasan 19sistem berbasis masyarakat	54,8
4	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	8,7
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	0,5
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	1,2
7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	4,6

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh bahwa empat Sasaran Kegiatan memiliki nilai efisiensi antara 1-20, satu Sasaran Kegiatan memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 dan dua Sasaran Kegiatan memiliki nilai efisiensi diatas 30. Hal ini menunjukkan bahwa SK2, SK4, SK6 dan SK7 telah efisien dalam pencapaian target kinerja tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Sedangkan untuk SK1 dan SK3 menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia dapat mendukung pencapaian target sehingga melebihi dari target yang telah ditentukan. Sementara untuk SK5 menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia hampir seluruhnya digunakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sasaran Kegiatan 1:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Capaian Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah 105,26%. Capaian IKU pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan target IKU pada tahun 2020 dengan target IKU tahun 2021, pada tahun 2020 target IKU adalah jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa, sementara pada tahun 2021 adalah persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 472.514.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Desember 2021 adalah Rp467.344.802 realisasi anggaran tahun 2021 adalah 97,91%. Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran pada Sasaran Kegiatan 1 diperoleh angka efisiensi 31,5%, dengan ini berarti alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan ini masih terlalu besar jika dibandingkan dengan target yang ditentukan.

IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IKU penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada tahun 2021 adalah 95%, dapat tercapai 100% dengan presentase capaian kinerja 105,26%.

Tabel 7. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung 2021

IDIKATOR KINERJA	2021		%	2024	
	TARGET	REALISASI		TARGET	%
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	95	100	105,26	65	153,85

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2021 dapat melebihi target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra 2020-2024. Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan. Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Tabel 8. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa	Presentase Capaian Pemeriksaan Tahun 2021
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikanyang dilindungi	5	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	13	100
3.	Pengawasan pengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil	13	100
4.	Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan	20	100
5.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	5	100
6.	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak	49	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		105	100

Rincian informasi capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di tahun 2021, sebagai berikut:

1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 (lima) unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dengan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan 100%, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Tahun 2021 yaitu terhadap :

a. PT. Rohtadi merupakan unit pengolahan ikan (sirip ikan hiu kering) yang beralamat di Jln. Perkamil Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa PT. Rohtadi memiliki dokumen perizinan meliputi SIUP, dan SKP. Dokumen perizinan lengkap dan sesuai, ikan olahan yang merupakan jenis ikan dilindungi secara terbatas sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BKSDA.

b. CV. Sumber Bahari Mandiri merupakan unit usaha Pengumpul, Penampung, Pengolahan, dan Pemasaran Teripang, Rumput Laut, Perut Ikan, Sirip Ikan Hiu, Abalone, dan Karang yang tidak dilindungi yang beralamat di JL. Kapasa Raya No. 38 Kel. Kapasa, Kota Makassar, memiliki dokumen perizinan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri dengan Nomor Surat No. 28/1/KKP/2020 dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2020 dengan Jenis Ikan Hiu dan Pari Apendiks II CITIES.

c. CV. Semangat Kawan Sejati Baru merupakan unit pengumpul dan penampung sirip ikan hiu kering (Dried Shark Wings). CV tersebut beralamat di Jl. Buru No 46 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa CV. Semangat Kawan Sejati Baru memiliki dokumen perizinan meliputi SIUP, HACCP, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri dan memiliki kuota ekspor jenis ikan dilindungi berdasarkan SK Dirjen PRL no. 49 Tahun 2021 Tentang jenis ikan yang dilindungi.

d. UD. Karya Nelayan merupakan unit pengumpul, penampung, pengolah dan pemasaran sirip ikan hiu. Beralamat di Jl. Barukang Utara no 26 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan

didapati bahwa UD. Karya Nelayan telah memiliki SIUP dan NIB serta adanya kesesuaian antara dokumen perizinan dengan jenis ikan yang diolah.

e. CV. Ciputri Prakarsa Utama merupakan unit pengumpul, penampungan, dan pemasaran sirip ikan hiu. Beralamat di Jl. Veteran Utama Lt.98 No 5. Kel. Wajo Baru Kec. Bontoala Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa CV. Ciputri Prakarsa Utama telah memiliki SIUP dan NIB serta adanya kesesuaian antara dokumen perizinan dengan jenis ikan yang diolah.

Capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, disebabkan perbedaan satuan pengukuran capaian yaitu tahun 2020 menggunakan satuan output pelaku usaha sedangkan pada tahun 2021 menggunakan satuan output presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 29.836.000 dan terealisasi Rp28.776.950, realisasi anggaran tahun 2021 adalah 96,45%.

2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 meliputi pengawasan pelaku usaha pasir laut dan SDNH lainnya dan pengawasan pelaku usaha wisata bahari, dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja IKU tahun 2020 dengan Capaian IKU 2021

Kegiatan	2020		2021		Capaian %
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Pengawasan Pelaku Usaha Pasir Laut dan SDNH Lainnya	3	3	4	4	100
Pengawasan Pelaku Usaha Wisata Bahari	10	14	9	9	100

Target pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa tahun 2021 sebanyak 13 pelaku usaha terealisasi sebanyak 13 pelaku usaha dengan persentase capaian 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 17 pelaku usaha, hal ini menunjukkan terdapat penurunan target jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya. Penurunan capaian disebabkan karena turunya target capaian output pelaku

usaha produk dan jasa kelautan yang diperiksa dan alokasi anggaran di tahun 2021.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp72.000.000 terealisasi sebesar Rp70.790.600 dengan persentase penyerapan anggaran 98,32%.

Hasil kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaku Usaha Produk Kelautan

Target penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengelolaan pasir laut dan SDNH lainnya tahun 2021 sebanyak 4 unit usaha. Pengawasan terhadap perusahaan pasir laut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP nomor: KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perusahaan Pasir Laut, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Telah dilakukan pengawasan terhadap 1 (satu) pelaku usaha Pengolahan dan penjualan Garam konsumsi beryodium di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Kulaka Jaya Perkasa merupakan unit usaha Penambangan pasir laut yang beralamat di Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kab. Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan berupa TDP, Izin Usaha Pertambangan, Izin Lokasi, Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan.
2. CV. Maju Bersama merupakan unit usaha Penambangan pasir sungai yang beralamat di Dusun Kalindu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat dan lokasi penambangan berada di Desa Ambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat. perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perdagangan.
3. CV. Kristal Garamindo merupakan unit usaha pengolahan dan penjualan garam konsumsi yang beralamat di Jl.Pahlawan RukoPasar Karisa No.5, Kel. Ampoang Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan . Hasilpemeriksaan terhadap dokumen perizinan, perusahaan tersebut telah memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai.
4. Kelompok Usaha Garam (Kugar) Usaha Lestari merupakan unit usaha Pengolahan dan penjualan Garam konsumsi beryodium yang beralamat di Jalan Poros Takalar–Jeneponto Bontomarannu-Bangkala, Kabupaten

Jeneponto, Prov.Sulawesi Selatan, perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan yang sesuai.

b. Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Kelautan

Pengawasan terhadap pelaku usaha jasa kelautan yaitu pengawasan pelaku usaha wisata bahari, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3/PER.DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Target capaian pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 sebanyak 9 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 9 pelaku usaha dan persentase capaian sebesar 100%. Rincian hasil kegiatan tahun 2021, sebagai berikut

1. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 05 Februari 2021 di PT. Pantai Tasik Ria Indah yang beralamat di Desa Mokupa, Kec.Tombariri, Kab.Minahasa, Jenis usaha hotel, wisata tirta dan diving dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
2. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 05 Februari 2021 di PT. Manado Underwater Explorations (MUREX) yang beralamat di Desa Kalasey, Kec.Mandolang Kab.Minahasa Sulawesi Utara. Jenis usaha Wisata Selam, Cottage, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
3. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di PT. Nusantara Dian Centre yang beralamat di Jl. Raya Molas, Lingkungan 4, Molas, Bunaken, Kota Manado. Jenis usaha Perhotelan, snorkeling, Diving, boat tour, olahraga pantai, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
4. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di PT. Taman Bambu (Thalassa Resort and PADI Dive Center) yang beralamat di Lingkungan I, Kel.Tongkaina, Kec.Bunaken Kota Manado. Sulawesi Utara, jenis usaha Cottage, and diving, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
5. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di Grand Luley Hotel PT. Panduharapan Nusa yang beralamat di Desa Tongkaina, Kel. Tongkaina, Kec. Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara, jenis usaha Hotel, snorkeling, selam, renang, konservasi mangrove. dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

6. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 Maret 2021 di Starbright Garden Beach Resort PT. Starbright Investasi Indonesia yang beralamat di Desa Kima Bajo, Kab.Minahasa Utara Sulawesi Utara, jenis usaha Cottage, rumah makan, diving, dan Spa, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
7. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 29 April 2021 di Sunari Beach Resort yang beralamat di Dusun Tanah Bau, Kel.Bontotangga, Kec.Bonto Haru, Kab.Selayar, Prop.Sulawesi Selatan. Jenis usaha Cottage, rumah makan, diving, dan Spa, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
8. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 05 Mei 2021 di La Merry Resort yang beralamat di Tarabitan Likupang Barat, Kab.Minahasa Utara (SULUT). Jenis usaha Hotel and Resort, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
9. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 21 Juni 2021 Pulocinta di PT. Pulocinta Indonesia Persada yang beralamat di Kelurahan Hungayonaa, Kecamatan Tolamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, jenis usaha Penginapan Cotage (Home Stay), dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Capaian target pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya tahun 2021 sebanyak 11 pelaku usaha. Tercapai sebanyak 13 pelaku usaha dengan persentase capaian 118,18%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 8 pelaku usaha, hal ini menunjukkan terdapat kenaikan jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya, namun dari sisi presentase capaian mengalami penurunan sekitar 1,82%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp69.300.000 terealisasi sebesar Rp66.926.200 dengan persentase penyerapan anggaran 96,57%.

Informasi kinerja pengawasan terhadap 13 (tiga belas) pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir

1. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 30 Maret 2021 di PT. Elnusa Petrofin yang beralamat di Desa Sapa Barat, Kec.Tenga, Kab.Minahasa Selatan. Jenis usaha Penyimpanan bahan bakar gas, dokumen perizinan meliputi dokumen izin lokasi dan izn pengelolaan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
2. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 31 Mei 2021 di PT. Pulisan yang beralamat di Desa Kinunang Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Jenis usaha Resort, dokumen perizinan meliputi dokumen izin lokasi dan izn pengelolaan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
3. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 9 September 2021 di BUMDesa Budo, Kecamatan Wori (Ekowisata Mangrove) yang beralamat di Desa Budo, Kecamatan Wori, Kab. Minahasa Utara. Jenis usaha wisata hutan mangrove. Pada saat pemeriksaan belum memiliki dokumen perizinan. Sehingga direkomendasikan untuk segera mengurus perizinan pada instansi terkait.

b. Pengawasan unit usaha pengelolaan ruang laut nasional

Sampai dengan 2021 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 7 (tujuh) pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 1 Maret 2021 di PLTU Minahasa Cahaya Lestari yang beralamat di Desa Kema 1, Kecamatan Kema, Kab.Minahasa Utara, jenis usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 16 Maret 2021 di Mangatasik Villa yang beralamat di Desa Tanawangko, Kec.Tombariri, Kab. Minahasa, jenis usaha Villa, pada saat pemeriksaan pemilik tidak dapat meunjukkan dokumen perizinan, dan direkomendasikan untuk segera mengurus dokumen perizinan pada instansi terkait.
3. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 9 Maret 2021 di Janji laut resort tanawangko yang beralamat di Desa Tanawangko, Kec.Tombariri, Kab. Minahasa, jenis usaha Penginapan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
4. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 9 April 2021

- di PT. Manado Korin Paradise yang beralamat di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, jenis usaha Hotel, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
5. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 05 Mei 2021 di CV Sunmoon Platform yang beralamat di Jaga 1, Kalinaun, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara. Jenis usaha perhotelan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai
 6. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 09 April 2021 di PT. Manado Korin Paradise yang beralamat di desa maen kecamatan likupang timur kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha perhotelan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
 7. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 14 September 2021 di Ranowanko Beach Resort yang beralamat di Desa Ranowanko II, Kec. Kombi, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha Resort, Cottage, Kolam renang, Restoran, Pantai umum, dan Kawasan khusus penangkaran penyu pada saat pemeriksaan pemilik tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sehingga direkomendasikan untuk segera mengurus dokumen perizinan pada instansi terkait.

c. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil

sampai dengan Triwulan III 2021 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 3 (tiga) pelaku usaha pengelolaan Pulau Pulau Kecil dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil pada tanggal 12 Juni 2021 di PT. Bastianos yang beralamat di Desa lihunu, kecamatan likupang timur, kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha resort/penginapan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
 2. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil pada tanggal 12 Juni 2021 di PT Coral Eye yang beralamat di Desa lihunu jaga VI kecamatan likupang timur kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha resort/penginapan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
 3. Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil pada tanggal 12 Juni 2021 di UD Cahaya Mutiara Manado yang beralamat di Desa Basaan kecamatan Ratatotok kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis usaha resort/penginapan, dokumen perizinan tidak lengkap dan tidak sesuai
- 4. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: KEP.59/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan. Kegiatan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada unit usaha yang bergerak di bidang perikanan meliputi usaha pengolahan ikan dan usaha pembudidaya ikan serta unit usaha yang bergerak di bidang non perikanan meliputi usaha tambang, pembangkit listrik, dan industri minyak kelapa.

Parameter pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yaitu: a) memiliki dokumen perizinan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan); b) memiliki IPAL; c) kesesuaian IPAL terpasang.

Target pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungan sebanyak 18 pelaku usaha, pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 20 (dua puluh) pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah, realisasi capaian kegiatan ini adalah 111,11%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 77.410.000 dan terealisasi sampai dengan tahun 2021 adalah Rp 75.031.500, realisasi anggaran adalah 96,93%. rincian pemeriksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah sebagai berikut :

1. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan CV Prima Indo Tuna pada tanggal 4 Februari 2021 yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 32 Kota Makassar, Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
2. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Prima Bahari Inti Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 12 KAV 5C Makassar, Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
3. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Dwira Masagena pada tanggal 12 Februari 2021 yang beralamat di Jl. Kima Raya 1 Kav B 5 Makassar, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
4. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Nichindo Manado Suisan pada tanggal 24 Februari 2021 yang beralamat di Kelurahan Pondang, kec. Amurang timur, kab.minahasa selatan, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
5. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Parlevliet Paraba Seafood pada tanggal 3 Maret 2021 yang beralamat di Jl. Jembatan Lama no. 89 Mandai – Kab. Maros, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.

6. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Deho Channing Company pada tanggal 15 maret 2021 yang beralamat di Kelurahan Madidir, Kota Bitung, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
7. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Ocean Champ Seafood pada tanggal 23 Maret 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 7 Kav J-2 Kota Makassar, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
8. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Kemilau Bintang Timur pada tanggal 24 Maret 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 3 Kav. 2-A Makassar, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
9. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Wahyu Pradana Binamulia pada tanggal 25 Maret 2021 yang beralamat di Jl. KIMA RAYA XT-2B Kawasan Industri Makassar, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
10. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Dunia Marine Products pada tanggal 23 Maret 2021 yang beralamat di Jl. KIMA 3 Kav. 48 Kawasan Industri Makassar, telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
11. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Marina Nusantara Selaras pada tanggal 05 Mei 2021 yang beralamat di Kelurahan Manembo-nembo Kec, Matuari, kota Bitung. Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
12. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Manadomina Citrataruna pada tanggal 19 Mei 2021 yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Telah memilikidokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
13. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Anping Seafood Indonesia pada tanggal .. Mei 2021 yang beralamat di Kelurahan Manembo nembo bawah, kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
14. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Indofood Sukses Makmur pada tanggal 28 Mei 2021 yang beralamat di JL. Walanda Maramis Madidir Weru Ling I, Pakadoodan, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
15. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Cargill Indonesia-Amurang pada tanggal 9 Juni 2021 yang beralamat di JL. Trans Sulawesi, kecamatan Amurang Barat. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
16. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Tri Mustika Coco Minaesa pada

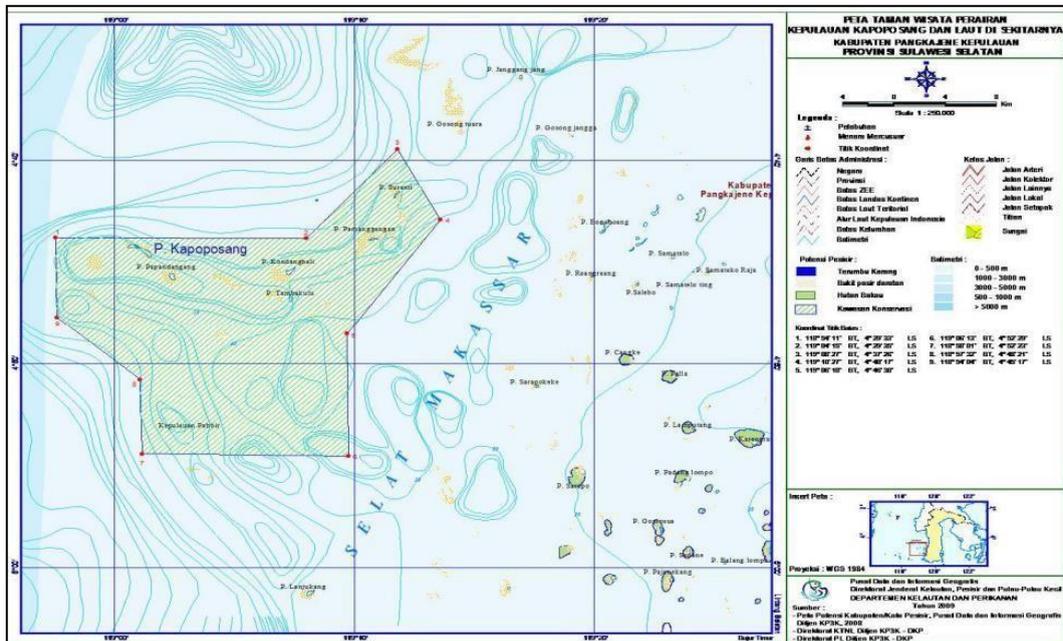
tanggal 16 Juni 2021 yang beralamat di jalan raya Amurang Kotamobagu Doloduo KM 90 desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, kabupaten Minahasa Selatan. Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

17. Pengawasan kegiatan non perikanan di PT Sasa Inti pada tanggal 9 Agustus 2021 yang beralamat di Desa Radey, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
18. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan CV Karya Bitung pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
19. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT Chen Woo Fishery pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Jl Worang Bypass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
20. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan CV Ken Jaya Perkasa pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.

5. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP memiliki target 17 (tujuh belas) kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Taman Wisata Perairan Gili Matra (NTB); 2) Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT); 3) Taman Wisata Perairan Kapoposang (Sulawesi Selatan); 4) Taman Wisata Perairan Pulau Pieh (Sumatera Barat); Taman Wisata Perairan Anambas (Kepulauan Riau); 6) SAP Raja Ampat (Papua Barat); 7) SAP Waigeo (Papua Barat); 8) SAP Aru Bagian Tenggara (Maluku); 9) Taman Wisata Perairan Padaido (Papua); 10) Taman Wisata Laut Banda (Maluku); 11) Taman Nasional Karimun Jawa ; 12) Taman Nasional Laut Bunaken; 13) Taman Nasional LautWakatobi; 14) Taman Nasional Laut Takabonerate; 15) Taman Nasional Teluk Cendrawasih; 16) Taman Nasional Laut Togean; dan 17) Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Angka 1 s/d 10 merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan angka 11 s/d 17 merupakan kawasan konservasi yang menurut rencana akan diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 4. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang



Pengawasan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

TWP Kapoposang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di WPP 713 dan EL 8 dengan luasan 50.000 ha, dasar hukum pengelolaan di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009, TWP Kapoposang telah dialihkan ke KKP dengan BA Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: BA.108/ Men.KP/III/2009. Potensi TWP Kapoposang terdiri dari terumbu Karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, dan penyu.

Target pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2021 adalah 3 pelaku usaha, Hasil pelaksanaan pengawasan pelaku usaha di TWP Kapoposang tahun 2021 oleh Satwas SDKP Makassar dan Wilker PSDKP Pangkep telah memeriksa 5 pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, dengan persentase capaian 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100% capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 target pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi mengalami penambahan target dan alokasi anggaran dari 2 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 3 pelaku usaha di tahun

2021.

Pemeriksaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kapal Jaya Bersama Matalaang No. BPKP : 45.20.7398.199.00202 masa berlaku sampai dengan 25 Oktober 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palelleko (4°51'12.80"BT 118°59'1.98"LS). Kapal yang diperiksa telah memiliki Surat BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) tetapi belum memiliki surat TDKPI (Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) kapal tersebut direkomendasikan untuk mengurus Surat TDKPI kepada UPT Pengelola Kawasan Konservasi TWP Kep. Kapoposang.
2. Kapal Bintang Mandiri MTL No. BPKP : 45.20.7398.199.00185 masa berlaku sampai dengan 8 November 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palelleko (4°51'9.51"BT 118°59'31.87"LS). Kapal yang diperiksa telah memiliki Surat BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) tetapi belum memiliki surat TDKPI (Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) kapal tersebut direkomendasikan untuk mengurus Surat TDKPI kepada UPT Pengelola Kawasan Konservasi TWP Kep. Kapoposang.
3. Kapal Irma Indah MTL No. SIPI : 26.20.7398.199.01592 masa berlaku sampai dengan 29 September 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palelleko (4°50'44.06"BT 118°59'23.04"LS). Kapal tersebut telah memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan).
4. Kapal Bombang Manai No SIPI 26.20.7395.56.01755 Masa Berlaku 20 Oktober 2021, dilakukan pemeriksaan di Taka Palelleko (4°51'8.69"BT 118°59'32.73"LS) hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal tersebut telah memiliki SIPI dan diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan.
5. Kapal Resky Saputra 02 No. SIPI 26.20.7395.199.01570 Masa Berlaku 07 Oktober 2021 dilakukan pemeriksaan di Taka Palelleko (4°49'57.38"BT 118°58'37.11"LS)) hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal tersebut telah memiliki SIPI dan diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 151.068.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 148.239.399, realisasi anggaran adalah 98,13%.

6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pengawasan *destructive fishing* dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan muatan

kapal yang berukuran ≤ 10 GT, menyambangi lokasi yang terindikasi terjadinya kegiatan *destructive fishing* sert menindak lanjuti aduan masyarakat terkait adanya aktifitas penggunaan bom dan bius ikan..

Target pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak tahun 2021 adalah 43 pelaku usaha, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 49 kapal perikanan dibawah 10GT dengan capaian 113,95%. Hasil pemeriksaan diketahui 21 kapal perikanan taat dan 28 kapal perikanan dinyatakan tidak taat karena dari hasil pengawasan *destructive fishing* diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak ekosistem perairan dan tidak memiliki dokume perizinan kapal perikanan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan dari 34 pelaku usaha yang diawasi menjadi 49 pelaku usaha pada tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 44% hal ini karena pada tahun 2021 mengalami kenaikan target pemeriksaan pelaku usaha.

Informasi kinerja pengawasan pelaku usaha perikanan yang diperiksa dari kegiatan *destructive fishing* di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (LK Mudding) yang berlokasi di Perairan Pulau Dua Laut pada tanggal 05-06 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Morowali hasil pemeriksaan kapal tersebut Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke Satwas PSDKP Kendari untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
2. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (LK Jumasri alias MABE) yang berlokasi di Perairan Pulau Tiga pada tanggal 05-06 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Morowali hasil pemeriksaan kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke Satwas PSDKP Kendari untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
3. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (LK. Anwar alias Allo) yang berlokasi di Perairan Pulau Tiga pada tanggal 05-06 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Morowali hasil pemeriksaan kapal tersebut Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya

- Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke Satwas PSDKP Kendari untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (LK. Manir) yang berlokasi di Perairan Pulau Tiga pada tanggal 05-06 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Morowali hasil pemeriksaan kapal tersebut Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke Satwas PSDKP Kendari untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
 5. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (ANDI bin ARIADI) yang berlokasi di Perairan Tanjung Harapan pada tanggal 02-03 Maret 2021 oleh Pengawas Perikanan Banggai hasil pemeriksaan kapal tersebut Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke PSDKP Morowali untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
 6. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (Kpto kaili) yang berlokasi di Perairan teluk Tomini/Perairan Desa Malenge pada tanggal 25 Maret 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke PSDKP Tojo Una una untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
 7. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Tanpa Nama (IRWAN THIIHA alias IWAN) yang berlokasi di Perairan Pulau Peling, Kab Banggai Kepulauan pada tanggal 07 April 2021 oleh PPNS/Pengawas Perikanan Kendari hasil pemeriksaan kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan selanjutnya Kapal dan awak kapal di amankan dan dibawa ke PSDKP Bangkeplut untuk diserahkan ke PPNS PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
 8. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Abdul Rahman yang berlokasi di Perairan Pulau Raja dan Pulau Popaya pada tanggal 14-15 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Gorontalo Utara hasil pemeriksaan kapal tersebut

- Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan
9. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdy Yusuf yang berlokasi di Perairan Pulau Raja dan Pulau Popaya pada tanggal 14-15 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Gorontalo Utara hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan
 10. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ismail yang berlokasi di Perairan Pulau Raja dan Pulau Popaya pada tanggal 14-15 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Gorontalo Utara hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan
 11. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Latif yang berlokasi di Perairan Pulau Raja dan Pulau Popaya pada tanggal 14-15 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Gorontalo Utara hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan
 12. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Robinson Puluhulawa yang berlokasi di Perairan Pulau Raja dan Pulau Popaya pada tanggal 14-15 Februari 2021 oleh Pengawas Perikanan Gorontalo Utara hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan
 13. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdianto yang berlokasi di Perairan Minahasa Utara pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan.
 14. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdianto 2 yang berlokasi di Perairan Minahasa Utara pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya dihimbau untuk tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya ikan.
 15. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Sigit Yahya) yang berlokasi di Perairan Minahasa Utara pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 16. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Rasyid) yang berlokasi di Perairan Minahasa Utara pada tanggal 10 Mei 2021

- oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
17. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Rasyid) yang berlokasi di Perairan Kotabunan pada tanggal 07 Mei 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung dan Pengawas Perikanan Belang hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 18. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama yang berlokasi di Perairan Kotabunan pada tanggal 07 Mei 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung dan Pengawas Perikanan Belang hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya Dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 19. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama yang berlokasi di Perairan Kotabunan pada tanggal 07 Mei 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung dan Pengawas Perikanan Belang hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya Dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 20. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Jims Katiandagho) yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 21. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Rafel) yang berlokasi di Perairan Likupang pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 22. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Datsote) yang berlokasi di Perairan Likupang pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 23. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Syahrul) yang berlokasi di Perairan Likupang pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumendan selanjutnya Dilakukan pembinaan untuk

- segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
24. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Hamid Tsanuraga) yang berlokasi di Perairan Likupang pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 25. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Jumadi Gabriel) yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya Dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 26. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Jufri Rapalawa) yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 15 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 27. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tanpa Nama (Marwan Wowor) yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 15 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya dilakukan pembinaan untuk segera mencatatkan kapal ke Dinas Perikanan setempat.
 28. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ratu Rosari 02 (Roman Sauring) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 29. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sumber Rizky 2018 (Alpian Manoso) yang berlokasi di Perairan Bolaang Mongondow pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing).
 30. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hati (Serpi Makawimbang) yang berlokasi di Perairan Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 31. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Al Annur (Rudy Puili) yang berlokasi di Perairan Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen

- lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
32. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rembang (Rusdi Poiyo) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 33. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ratu 07 (Darwin Gobel) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 34. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Citra Bahari 02 (Jefri Langi) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 35. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Aliya (Alwi Pasay) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 36. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Cemara 02 (Muhamad Gobel) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 37. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Anugra (Sukri Mamonto) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 38. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Alif 02 (Mansur Mahalipa) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 39. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Nusantara 07 (Ramli Mokoagow) yang berlokasi di Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 22 Juni 2021

- oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
40. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Rahmat 03 (Arif Ngalo) yang berlokasi di Perairan Minahasa pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 41. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Fauziah (Nawir Idris) yang berlokasi di Perairan Minahasa pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pengawas Perikanan Bitung hasil pemeriksaan kapal tersebut dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku dan selanjutnya tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
 42. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Kapal Biru; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang) yang berlokasi di Perairan Desa Matano (03 12,559' LS - 122 26,093' BT) pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh KP. HIU 02 hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya PM. Tanpa Nama (Kapal Biru) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
 43. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Kapal Abu-Abu; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang) yang berlokasi di Perairan Desa Tanjung Tiram (03 12,932' LS - 122 26,750' BT) pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh KP. HIU 02 hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya PM. Tanpa Nama (Kapal Abu-Abu) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
 44. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Kapal Merah Putih; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang) yang berlokasi di Perairan Desa Tanjung Tiram (03 12,932' LS - 122 26,750' BT) pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh KP. HIU 02 hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya PM. Tanpa Nama (Kapal Merah-Putih) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
 45. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Asdar) yang berlokasi di Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar pada tanggal 16 September 2021 oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Kep. Selayar hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan PM. Tanpa Nama (Pelaku: Asdar) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk

- pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut, selanjutnya dibawa dan diamankan ke Wilker PSDKP Selayar.
46. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Agus) yang berlokasi di Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar pada tanggal 16 September 2021 oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Kep. Selayar hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan PM. Tanpa Nama (Pelaku: Agus) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. selanjutnya dibawa dan diamankan ke Wilker PSDKP Selayar.
 47. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Muh. Hasbi) yang berlokasi di Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar pada tanggal 16 September 2021 oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Kep. Selayar hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya PM. Tanpa Nama (Pelaku: Muh. Hasbi) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. selanjutnya dibawa dan diamankan ke Wilker PSDKP Selayar.
 48. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Samsul) yang berlokasi di Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar pada tanggal 16 September 2021 oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Kep. Selayar hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya PM. Tanpa Nama (Pelaku: Samsul) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. selanjutnya dibawa dan diamankan ke Wilker PSDKP Selayar.
 49. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap PM. Tanpa Nama (Warna Putih; Pelaku Laipo) yang berlokasi di Perairan Togong Potil dan Perairan Pulau Tiga pada tanggal 18 September 2021 oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Bangkeplut hasil pemeriksaan kapal tersebut Kapal tanpa dokumen dan selanjutnya PM. Tanpa Nama (Pelaku: Laipo) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut., selanjutnya diamankan ke Wilker PSDKP Bangkeplut untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Pengawasan *destructive fishing* di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 masih menunjukkan kasus pelaku pemboman ikan masih marak dan tersebar diseluruh peta kerawanan bom ikan, dalam hal ini Pangkalan PSDKP Bitung dan Direktorat PPSDK Ditjen PSDKP telah melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan *destructive fishing* diantaranya adalah kampanye, edukasi dan deklarasi anti bom dan bus ikan terhadap masyarakat nelayan serta anak-anak usia

sekolah dasar yang dilakukan di wilayah rawan *destructive fishing*, seperti di Pagimana Kab. Banggai, di Pulau Sombori Kab. Morowali, di Tojo Una-Una Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, serta di Kawasan Konservasi Kapoposang Sulawesi Selatan. Selain itu deklarasi bersama aparat penegak hukum terkait juga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam pemberantasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku *destructive fishing*.

Selama tahun 2021 Pangkalan PSDKP Bitung telah menangani kasus tindak pidana kelautan yaitu pelaku pemboman dan bus ikan sebanyak 17 kasus, dan semua telah berstatus Inkracht.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2021 sebesar Rp 77.700.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 77.580.252, realisasi anggaran adalah 99,85%.

Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Capaian Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, target capaian IKU ini tahun 2021 adalah 100% dengan capaian kinerja tahun 2021 adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 820.583.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 798.904.470, realisasi anggaran adalah 97,36%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa nilai efisiensi Sasaran Kegiatan 2 ini adalah 1,9%. semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-2 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-2 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2020 capaian nya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian.

IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Presentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan tahun 2021 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha

perikanan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan yang diinput ke Simwaskan.

Tabel 10. Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

IDIKATOR KINERJA	2021		%	2024	
	TARGET	REALISASI		TARGET	%
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100	100	100	100	100

Target IKU 2 jika dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah tahun 2024 dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat tercapai sesuai target, namun demikian target pemeriksaan pelaku usaha perikanan pada setiap tahunnya mengalami kenaikan target pemeriksaan. Bisa kita lihat pada tabel perbandingan dibawah ini.

Tabel 11. Realisasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021		CAPAIAN %
		TARGET	REALISASI	
Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	94	101	101	100,00
Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	51	62	62	100,00
Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya	3211	3.450	3.357	97,30
Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	58	71	72	101,41

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya.

Informasi kinerja pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap produk perikanan yang akan diolah telah memenuhi persyaratan

mutu dan keamanan baik nasional maupun internasional. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan sesuai dengan Perdirjen PSDKP Nomor 3/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan, jenis usaha pengolahan ikan yang diawasi terdiri dari: penggaraman/pengeringan Ikan; pemindangan Ikan; pengasapan/ pemanggangan Ikan; peragian/ fermentasi Ikan; pembuatan minyak Ikan; pengalengan Ikan; pengolahan rumput laut; pembekuan Ikan; pendinginan/pengesan Ikan; pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi; dan/atau pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan sejenisnya.

Pemeriksaan UPI yang diperiksa terbagi atas UPI skala besar dan skala kecil, yaitu:

1. Pengawasan UPI skala besar, meliputi usaha milik perorangan ataupun kelompokperusahaan modal asing (PMA)/perusahaan modal dalam negeri (PMDN);terdaftar/tercatat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota; danmemiliki SIUP, SKP, HACCP/PMMT, dan HC.
2. Pengawasan UPI skala kecil, meliputi usaha milik perorangan, UKM (Usaha Kecil Mikro)/Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar); terdaftar/tercatat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya (formalin, boraks, zat warna).

Target pemeriksaan UPI tahun 2021 adalah 101 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan tingkat persentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pemeriksaan pada tahun 2020 adalah 94 UPI, dan pada tahun ini mengalami penambahan target pemeriksaan UPI menjadi 101 UPI atau mengalami kenaikan sebesar 6,94%. dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap UPI PT. Carvinna Trijaya Makmur yang beralamat di Jl. Arnoldus Sompotan, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan kaleng dan ikan tuna beku
2. Pengawasan terhadap UPI PT. Sari Tuna Makmur yang beralamat di Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan segar dan beku.
3. Pengawasan terhadap UPI PT. Blue Ocean Grace International yang beralamat di Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitungjenis produk yang dihasilkan Tuna beku
4. Pengawasan terhadap UPI PT. Bintang Mandiri bersaudara yang beralamat di Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, jenis produk

- yang dihasilkan Ikan segar dan beku.
5. Pengawasan terhadap UPI CV. Prima Indo Tuna yang beralamat di Jl. Insinyur Sutami No.32, Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk yang dihasilkan Ikan segar dan beku.
 6. Pengawasan terhadap UPI PT. Prima Bahari Inti Lestari yang beralamat di Jl. Kima Raya I No.12, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 7. Pengawasan terhadap UPI PT. Dwira Masagena yang beralamat di Jl. Kapasa Raya No.24, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 8. Pengawasan terhadap UPI PT. Chen Woo Fishery yang beralamat di Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara jenis produk yang dihasilkan Ikan beku dan ikan segar.
 9. Pengawasan terhadap UPI CV. Momar Biru Sejahtera yang beralamat di Jl. Poros Lasalimu, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 10. Pengawasan terhadap UPI CV. Golden KK yang beralamat di Jalan Baru Tugu Adipura, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado jenis produk yang dihasilkan Ikan segar.
 11. Pengawasan terhadap UPI Wilhelmina Puluhulawa yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 12. Pengawasan terhadap UPI Shiddik Abdul Razak yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 13. Pengawasan terhadap UPI Herlina Daud yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 14. Pengawasan terhadap UPI Usaha Baru yang beralamat di Desa Asalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 15. Pengawasan terhadap UPI Yanti Mopatu yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara jenis produk yang dihasilkan Ikan asin.
 16. Pengawasan terhadap UPI Masna Kahipe yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 17. Pengawasan terhadap UPI Ratna Humunggio yang beralamat di Desa Asalae,

- Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
18. Pengawasan terhadap UPI Wis Dapai yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 19. Pengawasan terhadap UPI PT. Palma Marinaio Nusantara yang beralamat di Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan segar.
 20. Pengawasan terhadap UPI PT. Samudra Mandiri Sentosa yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi KM. 5 Wangurer, Kel. Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Tuna kaleng, tuna loin, tuna pouch, tepung ikan.
 21. Pengawasan terhadap UPI PT. Deho Canning Company yang beralamat di Jl. Raya Madidir RT.21 Lingk. VI, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Tuna kaleng, Tuna segar, Tuna beku, ikan nike beku.
 22. Pengawasan terhadap UPI PT. Kemilau Bintang Timur yang beralamat di Jl. Kima III No.Kav.2A, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku, daging rajungan pasteurisasi.
 23. Pengawasan terhadap UPI PT. Sinar Pure Foods International yang beralamat di Jl. Raya Madidir, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan kaleng.
 24. Pengawasan terhadap UPI UD. Rainbow Grace Fisheries yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Tuna beku dan tuna segar.
 25. Pengawasan terhadap UPI PT. Barumbun Jaya yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 26. Pengawasan terhadap UPI PT. Etmieco Sarana Laut yang beralamat di Jl. Samuel Languyu No. 8A, Kelurahan Aertembaga I, Lingkungan II Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan kayu.
 27. Pengawasan terhadap UPI PT. Etmieco Makmur Abadi yang beralamat di Jl. Samuel Languyu No. 8A, Kelurahan Aertembaga I, Lingkungan II Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 28. Pengawasan terhadap UPI CV. Indotropic Fishery yang beralamat di Jl. Raya

- KM. 9, Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah jenis produk yang dihasilkan Ikan Beku.
29. Pengawasan terhadap UPI PT. Banggai Indo Gemilang yang beralamat di JL. Raya Kilongan KM.5, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 30. Pengawasan terhadap UPI PT. Ocean Champ Seafood yang beralamat di Jl. Kima VII/ Kav. J-2, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk yang dihasilkan Daging rajungan pasteurisasi.
 31. Pengawasan terhadap UPI PT. Wahyu Pradana Binamulia yang beralamat di Jl. Kima Raya XT - 2 B, Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku, ikan segar, telur ikan terbang kering
 32. Pengawasan terhadap UPI PT. Parlevliet Paraba Seafood yang beralamat di Jl. Jembatan Tua No. 89, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jenis produk yang dihasilkan ikan segar dan ikan beku.
 33. Pengawasan terhadap UPI UD. Berdikari yang beralamat di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 34. Pengawasan terhadap UPI Rajungan Berkah yang beralamat di Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 35. Pengawasan terhadap UPI Umar Gobel yang beralamat di Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan kering.
 36. Pengawasan terhadap UPI Rinto Hilumalo yang beralamat di Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan kering.
 37. Pengawasan terhadap UPI Endang Katili yang beralamat di Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan kering.
 38. Pengawasan terhadap UPI Hasim Buheli yang beralamat di Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan kering
 39. Pengawasan terhadap UPI CV. Sakura Prima yang beralamat di Dusun Naukkaluku, Desa Lalattedong, Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 40. Pengawasan terhadap UPI CV. Camar Laut yang beralamat di Jl. Raja Wadi Polapa, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, jenis produk yang dihasilkan Ikan segar.

41. Pengawasan terhadap UPI PT. Nichindo Manado Suisan yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi KM. 52 Kel. Pondang, Lingkungan VII, Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan jenis produk yang dihasilkan Ikan kayu dan Tepung ikan.
42. Pengawasan terhadap UPI PT. Brilliant Ocean Fish yang beralamat di Lingkungan II RT. 004, Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan tuna beku.
43. Pengawasan terhadap UPI PT. Sari Malalugis yang beralamat di Kel. Madidir Weru. Lingkungan I, Kel. Madidir Weru, Kec. Madidir, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
44. Pengawasan terhadap UPI PT. Sari Cakalang yang beralamat di Madidir Weru Lingkungan IV, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Tuna segar dan tuna beku.
45. Pengawasan terhadap UPI PT. Shing Sheng Fa Ocean yang beralamat di Madidir Lingkungan III, Kelurahan Paceda, Kecamatan madidir, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
46. Pengawasan terhadap UPI PT. Manadomina Citrataruna yang beralamat di Kel. Wangurer Timur, Lingk I, Kec. Madidir, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan kayu.
47. Pengawasan terhadap UPI PT. Anping Seafood Indonesia yang beralamat di Jl. Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Steak Tuna Beku, Fillet Tuna Beku.
48. Pengawasan terhadap UPI PT. Triko Bina Nusantara yang beralamat di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Buton, jenis produk yang dihasilkan Tuna loin, Ikan beku.
49. Pengawasan terhadap UPI PT. Chen Woo Fishery yang beralamat di Jalan Kima IV Blok k9/B-2, Tamalanrea, Daya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku, ikan segar.
50. Pengawasan terhadap UPI CV. Sumber Bahari Mandiri yang beralamat di Jl. Kapasa Raya No.38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk yang dihasilkan Sirip Hiu Kering.
51. Pengawasan terhadap UPI Poklahsar Zahra yang beralamat di BTN Pole Indah Mas, Kel. Darma, Kec. Polewali Kab. Polman, jenis produk yang dihasilkan Abon ikan, Amplan.
52. Pengawasan terhadap UPI KUB Gowes Pantai yang beralamat di Desa Rea, Polewali Kab. Polewali Mandar jenis produk yang dihasilkan Abon ikan.
53. Pengawasan terhadap UPI Juhria Giu yang beralamat di Ds. Katialada, Kec.

- Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Daging Rajungan beku.
54. Pengawasan terhadap UPI Hedianto yang beralamat di Lorong Pemotongan Sapi, Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, jenis produk yang dihasilkan Tuna loin segar.
 55. Pengawasan terhadap UPI Ocean yang beralamat di Jl. Wakaaka Kel. Kaabula, Baubau jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 56. Pengawasan terhadap UPI UD. Teri yang beralamat di Ds. Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, jenis produk yang dihasilkan Ikan kering.
 57. Pengawasan terhadap UPI PT. Laut Jaya Sentosa yang beralamat di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai tengah, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 58. Pengawasan terhadap UPI PT. Sinar Malalugis Makmur yang beralamat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 59. Pengawasan terhadap UPI CV. 99 yang beralamat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 60. Pengawasan terhadap UPI PT. Sultratuna Samudrayang beralamat di Kompleks PPS Kendari. Jl. Samudera No. 1 Kel. Puday, Kec. Abeli Kendari jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 61. Pengawasan terhadap UPI PT. Harapan Mujur Samudera yang beralamat di Jl. Samudera .Kel. Puday ,Kec. Abeli ,Kota Kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 62. Pengawasan terhadap UPI UD. DY yang beralamat di Jl. Kel. Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, jenis produk yang dihasilkan Ikan segar.
 63. Pengawasan terhadap UPI PT. Dharma Samudra Fishing Industries yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 39 Kendari, Sulawesi Tenggara jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 64. Pengawasan terhadap UPI PT. Edco Putra Jaya yang beralamat di kompleks pps kendari kavling 10 - jl. Samudera no. 1 kel. Puday kec. Abeli kota kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 65. Pengawasan terhadap UPI PT. Satya Trinadi Komira Perkasa yang beralamat di kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli Kota Kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 66. Pengawasan terhadap UPI PT. Sartomo Sakti yang beralamat di JL.

- Samudera no. 1 Kompleks PPS Kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
67. Pengawasan terhadap UPI UD. Ibrahim yang beralamat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut jenis produk yang dihasilkan Ikan segar
 68. Pengawasan terhadap UPI PT. Satya Trinadi Komira Perkasa yang beralamat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut jenis produk yang dihasilkan Ikan beku
 69. Pengawasan terhadap UPI UD. FZL yang beralamat di Desa Lampa Dusun IV, Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, jenis produk yang dihasilkan Ikan segar.
 70. Pengawasan terhadap UPI PT. Mina Jaya Lestari yang beralamat di Kompleks PPS Kendari Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 71. Pengawasan terhadap UPI UD. Aneka Laut yang beralamat di JL. Poros nii Tanasa Kelurahan Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten konawe, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 72. Pengawasan terhadap UPI PT. Kelola Mina Laut yang beralamat di kompleks PPS kendari Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 73. Pengawasan terhadap UPI PT. Ome Trading Coy yang beralamat di Kompleks PPS kendari Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari, jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 74. Pengawasan terhadap UPI PT. Grahamakmur Ciptapratama yang beralamat di Jl. Poros Toronipa Desa Tapulaga, Kec. Soropia, Kabupaten Konawe, jenis produk yang dihasilkan Udang Beku, Ikan Beku.
 75. Pengawasan terhadap UPI CV. Sinar Samudera yang beralamat di Jl. Durian No. 1, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, jenis produk yang dihasilkan Tuna segar Loin.
 76. Pengawasan terhadap UPI CV. Tomini Bay Seafood yang beralamat di Jl. Raya Manado Tomohon 79, Kelurahan Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, jenis produk yang dihasilkan Tuna segar dan tuna beku.
 77. Pengawasan terhadap UPI PT. Galesong yang beralamat di Jl. Baso Dg Bella No. 8, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, jenis produk yang dihasilkan telur ikan terbang kering.
 78. Pengawasan terhadap UPI PT. Nutrindo Fresfood Internasional yang

- beralamat di Jl. Lingkungan I, Kel. Tanjung Merah, Kec. Matuari, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan beku dan ikan segar.
79. Pengawasan terhadap UPI UD. Berkah Laipu yang beralamat di Lingkungan I, RT 003, Kelurahan Pinangunian, Kecamatan Aertembga, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Tuna Segar.
 80. Pengawasan terhadap UPI PT. Perikanan Nusantara yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan beku dan ikan segar.
 81. Pengawasan terhadap UPI PT. Budi Sentosa Abadi yang beralamat di Jl. Samuel Languyu No. 10, Kelurahan Aertembaga I, Lingkungan II Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan segar dan ikan beku.
 82. Pengawasan terhadap UPI Philips yang beralamat di Jl. Sungai Pareman I No. 32 Palopo, Sulawesi Selatan, jenis produk yang dihasilkan Daging Rajungan beku.
 83. Pengawasan terhadap UPI Cakalang Mas yang beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng No. 19, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo jenis produk yang dihasilkan Abon Tuna, Teri Gurih.
 84. Pengawasan terhadap UPI CV. Berkat Adidaya yang beralamat di Jl. Sasuit Tubun, Kelurahan. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 85. Pengawasan terhadap UPI PT. Mina Timur Indonesia yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 8 Bontolanra, Kec. Galesong Utara Takalar, jenis produk yang dihasilkan telur ikan terbang kering
 86. Pengawasan terhadap UPI PT. Sari Usaha Mandiri yang beralamat di Kelurahan Manembo Nembo Bawah, Kecamatan Matuari Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan Beku.
 87. Pengawasan terhadap UPI PT. Cenhong Fisherindo yang beralamat di Jl. Masjid annur, Kel. Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan Beku.
 88. Pengawasan terhadap UPI PT. Indo Lautan Mas yang beralamat di Jl. Tanjung Merah Kel. Manembo nembo Kec. Matuari Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
 89. Pengawasan terhadap UPI Ikan Asap yang beralamat di Desa Singa, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, jenis produk yang dihasilkan Ikan asap.
 90. Pengawasan terhadap UPI Syamsiah yang beralamat di Lingkungan Kassi Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba jenis produk yang dihasilkan Ikan Pindang.

91. Pengawasan terhadap UPI Ambo Upe yang beralamat di Lingkungan Kassi Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, jenis produk yang dihasilkan Ikan Pindang.
92. Pengawasan terhadap UPI PT. Indo Jaya Fortuna yang beralamat di Kelurahan Manembo Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung jenis produk yang dihasilkan Ikan segar dan ikan beku.
93. Pengawasan terhadap UPI PT. Phillips Seafood Indonesia yang beralamat di Jl. Lamelleng No. 42 KM. 147, Desa Bojo Barru, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru jenis produk yang dihasilkan Ikan beku, ikan segar, Daging Rajungan Pasteurisasi dingin,
94. Pengawasan terhadap UPI KANELA yang beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado jenis produk yang dihasilkan Abon Ikan.
95. Pengawasan terhadap UPI CV. SIJ Tanjung Merah yang beralamat di Kelurahan Tanjung Merah, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
96. Pengawasan terhadap UPI PT. Fishing Trade International yang beralamat di Kelurahan Madidir Unet, Lingk III, RT 013, RW. 003 Kec. Madidir Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan segar.
97. Pengawasan terhadap UPI Poklahzar Marlin yang beralamat di Kelurahan Takkatidung, Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat jenis produk yang dihasilkan Abon Ikan.
98. Pengawasan terhadap UPI PT. Celebes Minapratama yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan kayu.
99. Pengawasan terhadap UPI PT. Fresh Tuna Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Maumbi Jaga XVI, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, jenis produk yang dihasilkan Tuna Segar.
100. Pengawasan terhadap UPI PT. Mitra Jaya Samudera yang beralamat di Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Ikan beku.
101. Pengawasan terhadap UPI CV. Samudera Pangan Indonesia yang beralamat di Jl. Dumais Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung, jenis produk yang dihasilkan Tuna Segar.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 242.366.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 238.052.600, persentase realisasi anggaran adalah 98,22%.

2. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan usaha distribusi hasil perikanan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 14/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan. Kategorisasi unit usaha distribusi hasil perikanan terdiri atas: Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan pemasukan/impor hasil perikanan dan Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan.

Target pengawasan pelaku usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan tahun 2021 adalah 62 (enam puluh dua) pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya, dengan hasil presentase capaian pemeriksaan 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaian pemeriksaannya mengalami kenaikan sebesar 21,5% atau bertambah dari 51 pelaku usaha yang diperiksa pada tahun 2020 menjadi 62 pelaku usaha yang diperiksa, untuk capaian IKUnya tidak dapat dibandingkan karena menggunakan perhitungan output yang berbeda yang mana pada tahun 2020 satuan outputnya pelaku usaha sedangkan pada tahun 2021 menggunakan perhitungan capaian penyelesaian pemeriksaan.

Informasi kinerja pemeriksaan pelaku usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan distribusi di PT. Dwira Masagena yang beralamat di Jl. Kapasa Raya No.24, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
2. Pengawasan distribusi di PT. Blue Ocean Grace International yang beralamat di Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
3. Pengawasan distribusi di PT. Carvinna Trijaya Makmur yang beralamat di Jl. Arnoldus Sompotan, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung jenis produk Ikan cakalang loin masak beku dengan tujuan distribusi ke negara Thailand dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
4. Pengawasan distribusi di PT. Prima Bahari Inti Lestari yang beralamat di Jl. Kima Raya I No.12, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Perancis dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.

5. Pengawasan distribusi di PT. Wahyu Pradana Binamulia yang beralamat di Jl. Kima Raya XT-2 B, Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Cyprus dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
6. Pengawasan distribusi di PT. Parlevliet Paraba Seafood yang beralamat di Jl. Jembatan Tua No. 89, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
7. Pengawasan distribusi di PT. Etmieco Sarana Laut yang beralamat di Jl. Samuel Languyu No. 8A, Kelurahan Aertembaga I, Lingkungan II Kota Bitung jenis produk Ikan kayu dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
8. Pengawasan distribusi di PT. Palma Marinaio Nusantara yang beralamat di Kompleks PPS Bitung, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
9. Pengawasan distribusi di PT. Kemilau Bintang Timur yang beralamat di Jl. Kima III No.Kav.2A, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk Rajungan Beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
10. Pengawasan distribusi di PT. Delta Pasific Indotuna yang beralamat di Jl. Veteran, Girian Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Girian Kota Bitung jenis produk ikan Kaleng dengan tujuan distribusi ke negara Yaman dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
11. Pengawasan distribusi di PT. Banggai Indo Gemilang yang beralamat di JL. Raya Kilongan KM.5, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
12. Pengawasan distribusi di CV. Indotropic Fishery yang beralamat di Jl. Raya KM. 9, Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
13. Pengawasan distribusi di UD. Rainbow Grace Fisheries yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat
14. Pengawasan distribusi di PT. Sinar Pure Foods International yang beralamat di

- Jl. Raya Madidir, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung jenis produk Ikan Tuna Dalam Kaleng dengan tujuan distribusi ke negara Australia dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
15. Pengawasan distribusi di PT. Deho Canning Company yang beralamat di Jl. Raya Madidir RT.21 Lingk. VI, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
 16. Pengawasan distribusi di PT. Ocean Champ Seafood yang beralamat di Jl. Kima VII/ Kav. J-2, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan jenis produk Rajungan Beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
 17. Pengawasan distribusi di PT. Brilliant Ocean Fish yang beralamat di Lingkungan II RT. 004, Kelurahan Aertembaga II, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
 18. Pengawasan distribusi di PT. Sari Cakalang yang beralamat di Madidir Weru Lingkungan IV, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Thailand dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
 19. Pengawasan distribusi di CV. Camar Laut yang beralamat di Jl. Raja Wadi Polapa, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Singapura dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
 20. Pengawasan distribusi di PT. Anping Seafood Indonesia yang beralamat di Jl. Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
 21. Pengawasan distribusi di PT. Manadomina Citrataruna yang beralamat di Kel. Wangurer Timur, Lingk I, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk Ikan Kayu dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
 22. Pengawasan distribusi di PT. Chen Woo Fishery yang beralamat di Jalan Kima IV Blok k9/B-2, Tamalanrea, Daya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241, jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
 23. Pengawasan distribusi di PT. Grahamakmur Ciptapratama yang beralamat di Jl. Poros Toronipa Desa Tapulaga, Kec. Soropia, Kabupaten Konawe, jenis produk Udang beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.

24. Pengawasan distribusi di UD. Tomini Bay Seafood yang beralamat di Jl. Raya Manado Tomohon 79, Kelurahan Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut
25. Pengawasan distribusi di CV. Sakura Prima yang beralamat di Dusun Naukkaluku, Desa Lalattedong, Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat, jenis produk telur ikan terbang dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
26. Pengawasan distribusi di CV. Semangat Kawan Sejati Baru yang beralamat di Jl. Buru No. 46 Kota Makassar jenis produk Sirip Ikan Hiu Kering dengan tujuan distribusi ke negara Hongkong dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
27. Pengawasan distribusi di CV. Golden KK yang beralamat di Jl. Baru Tugu Adipura No. 9, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Singapura dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
28. Pengawasan distribusi di CV. Tuna Bahari yang beralamat di Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
29. Pengawasan distribusi di CV. Samudra Pangan Indonesia yang beralamat di Jl. Dumais Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
30. Pengawasan distribusi di PT. Perikanan Nusantara yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
31. Pengawasan distribusi di PT. Laut Biru Seafood yang beralamat di Jl. Lumbalumba, Lingkungan IV, RT 01/ RW 04 Kelurahan Girian Bawah, Girian, Kota Bitung, jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
32. Pengawasan distribusi di CV. Ken Jaya Perkasa yang beralamat di Kauditan II, Kauditan, Minahasa Utara, jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Australia dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
33. Pengawasan distribusi di PT. Chen Woo Fishery yang beralamat di Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, jenis produk Tuna beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan

- menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
34. Pengawasan distribusi di CV. Adi Tirta yang beralamat di Kompleks pelabuhan Perikanan Untia, Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, jenis produk Rumput Laut dengan tujuan distribusi ke negara China dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
 35. Pengawasan distribusi di PT. Phillips Seafoods Indonesia yang beralamat di Jl. Lamelleng No. 42 KM. 147, Desa Bojo Barru, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, jenis produk Rajungan Beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
 36. Pengawasan distribusi di PT. Rohtadi yang beralamat di Jl. Tikala Kumaraka, Lingkungan III No. 23, Kel. Tikala Kumaraka, Kec. Tikala, Kota manado, jenis produk Sirip Ikan Hiu Kering dengan tujuan distribusi ke negara Hongkong dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
 37. Pengawasan distribusi di PT. Marina Nusantara Selaras yang beralamat di Jl. Tanjung Merah Kel. Manembo nembo Kec. Matuari Kota Bitung, jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut
 38. Pengawasan distribusi di PT. Nutrindo Fresfood International yang beralamat di Jl. Lingkungan I, Kel. Tanjung Merah, Kec. Matuari, Kota Bitung, jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
 39. Pengawasan distribusi di PT. Dunia Marine Product yang beralamat di Jl. Kima 3 , KAV 4B, Makassar, jenis produk Cumi Cumi Beku dengan tujuan distribusi ke negara Korea dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
 40. Pengawasan distribusi di CV. Prima Indo Tuna yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 32 Kota Makassar, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Belanda dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.
 41. Pengawasan distribusi di CV. Baris Anugerah yang beralamat di Dusun III, Kel. Dulomo, Kec. Tilango, Kabupaten Gorontalo, jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunkanan sarana angkutan Pesawat.
 42. Pengawasan distribusi di PT. Fishing Trade International yang beralamat di Kelurahan Madidir Unet, Lingk III, RT 013, RW. 003 Kec. Madidir Kota Bitung, jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunkanan sarana angkutan Pesawat.
 43. Pengawasan distribusi di PT. Nichindo Manado Suisan yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi KM. 52 Kel. Pondang, Lingkungan VII, Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, jenis produk Ikan kayu dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunkanan sarana angkutan Kapal laut.

44. Pengawasan distribusi di PT. Kelola Mina Laut yang beralamat di Jl. Kima 17 Blok DD 15-16, Makassar, jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
45. Pengawasan distribusi di PT. Usaha Central Jaya Sakti yang beralamat di Jl. Kima V, Kav. E No. 3 A. Makassar, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
46. Pengawasan distribusi di PT. Nuansa Cipta Magelo yang beralamat di Jl. Kima 3, KAV 5AB, Makassar jenis produk Daging Rajungan Pasteurisasi dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
47. Pengawasan distribusi di PT. Sukses Hasil Alam Nusanindo yang beralamat di Jl. Kima 9, Kav L No. 11 C Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Ikan Demersal beku dengan tujuan distribusi ke negara Australia dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
48. Pengawasan distribusi di PT. Nirvana Niaga Sejahtera yang beralamat di Jl. Kima 6, KAV FIII/B1 dan FIII/B2. Kota Makassar, jenis produk Tuna Beku dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
49. Pengawasan distribusi di PT. Sonok Lestari Mas yang beralamat di Jl. Soekarno No 60, Kota Bitung, jenis produk Kerapu Hidup dengan tujuan distribusi ke negara Hongkong dan menggunakan sarana angkutan Kapal Angkut Ikan Hidup.
50. Pengawasan distribusi di PT. Celebes Minapratama yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung jenis produk Ikan Kayu dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut
51. Pengawasan distribusi di UD. Riski Samudra Jaya yang beralamat di Jl. Tadulako Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis produk Kerapu Hidup dengan tujuan distribusi ke negara Hongkong dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
52. Pengawasan distribusi di PT. Bintang Megah Jaya Perkasa yang beralamat di Jl. Poros Makassar - Maros No.50, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Ikan Tenggiri dan Kerapu Segar dengan tujuan distribusi ke negara Singapura dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
53. Pengawasan distribusi di UD. Golden Ocean Aquarium yang beralamat di Jl. Minanga No 16, Lingkungan VII, Malalayang Satu, Malalayang, Manado, jenis produk Ikan hias air laut dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.

54. Pengawasan distribusi di CV. Anugerah Bahari Mandiri yang beralamat di Jl. Kapasa Raya No.38 A, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
55. Pengawasan distribusi di CV. Buana Laut Nusantara yang beralamat di Jl. Kima VI Kav. F.1 B1, Kota Makassar, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Thailand dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
56. Pengawasan distribusi di PT. Biru Laut Nusantara yang beralamat di Jl. Kima VIII, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis produk Gurita beku dengan tujuan distribusi ke negara Amerika dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
57. Pengawasan distribusi di PT. Fresh Tuna Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Maumbi Jaga XVI, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Thailand dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
58. Pengawasan distribusi di PT. Mina Timur Indonesia yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 8 Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Takalar jenis produk telur ikan terbang dengan tujuan distribusi ke negara Chinadan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
59. Pengawasan distribusi di CV. Indo Marine Fish yang beralamat di Jl. Gunung Latimojong No. 67 Kota Makassar, jenis produk Kerapu Hidup dengan tujuan distribusi ke negara Hongkong dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut
60. Pengawasan distribusi di UD. Berkah laipuu yang beralamat di Lingkungan I, RT 003, Kelurahan Pinangunian, Kecamatan Aertembga, Kota Bitung, jenis produk Tuna Segar dengan tujuan distribusi ke negara Jepang dan menggunakan sarana angkutan Pesawat.
61. Pengawasan distribusi di PT. Mitra Kartika Sejati yang beralamat di Jl. Kima Raya I Kav. D-1B, Daya, Biringkanaya, Makassar, jenis produk Udang beku dengan tujuan distribusi ke negara Belanda dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.
62. Pengawasan distribusi di PT. Samudera Mandiri Sentosa yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi KM. 5 Wangurer, Kel. Wangurer Timur, Kec. Madidir, Kota Bitung, jenis produk Ikan Kaleng dengan tujuan distribusi ke negara Australia dan menggunakan sarana angkutan Kapal laut.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 87.200.000 dan realisasi sampai dengan tahun 2021 adalah Rp.

87.189.000, dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%.

3. Unit Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, pelaksanaan pengawasan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan, yang dimaksud dengan Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Objek pengawasan kapal perikanan meliputi: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan dan kapal pendukung operasi pembudidaya ikan. Pelaksanaan pengawas kapal perikanan meliputi: Pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan; Pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan; dan Pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan. Dalam pelaksanaan pengawasan kapal perikanan pada saat keberangkatan, setiap kapal wajib melaporkan rencana keberangkatannya (kecuali untuk kapal perikanan yang berukuran $\leq 10\text{GT}$) dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan baik persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, yang terdiri dari: Kesesuaian SIPI/SIKPI; Kesesuaian alat penangkap ikan (jenis dan spesifikasi); Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan; Kesesuaian fisik kapal (jenis kapal, ukuran GT, nomor seri dan merk mesin, tanda selar kapal); Kesesuaian komposisi ABK dengan Crew List; Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut; Transmitter SPKP (untuk kapal perikanan diatas 30 GT); dan Keberadaan bahan atau alat yang berada diatas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan.

Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum seluruhnya menerapkan pelayanan kapal perikanan melalui aplikasi Simwaskan karena terkendala jaringan internet di beberapa Wilker PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Berikut ini adalah pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan dan yang belum menggunakan Simwaskan:

Tabel 12. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melalui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Tahun 2021

No	UPT/Satwas/Wilker	Kapal Perikanan yang diperiksa Kepatuhannya Melalui Simwaskan
1	Pangkalan PSDKP Bitung	711
2	Satwas SDKP Gorontalo Utara	42
3	Satwas SDKP Gorontalo	144
4	Satwas SDKP Kendari	395
5	Satwas SDKP Makassar	218
6	Satwas SDKP Takalar	409
7	Satwas SDKP Mamuju	91
8	Wilker PSDKP Selayar	27
9	Wilker PSDKP Sinjai	630
10	Wilker PSDKP Tumumpa	137
11	Wilker PSDKP Amurang	6
12	Wilker PSDKP Banggai	3
13	Wilker PSDKP Banggai Kepulauan	48
14	Wilker PSDKP Bau-Bau	3
15	Wilker PSDKP Belang	54
16	Wilker PSDKP Boalemo	13
17	Wilker PSDKP Bone	74
18	Wilker PSDKP Bulukumba	6
19	Wilker PSDKP Donggala	84
20	Wilker PSDKP Kolaka	8
21	Wilker PSDKP Labuan Uki	18
22	Wilker PSDKP Majene	1
23	Wilker PSDKP Mamuju Utara	1
24	Wilker PSDKP Minahasa Utara	45
25	Wilker PSDKP Molibagu	22
26	Wilker PSDKP Palopo	3
27	Wilker PSDKP Parigi Moutong	11
28	Wilker PSDKP Pasar Wajo	7
29	Wilker PSDKP Pohuwato	11
30	Wilker PSDKP Polewali Mandar	5
31	Wilker PSDKP Tojo Una-Una	7
32	Wilker PSDKP Toli-Toli	1
33	Wilker PSDKP Torobulu	1
	Jumlah	3255

Tabel 13. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya bukan melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Tahun 2021

No.	UPT/SATWAS/WILKER PSDKP	Kapal Perikanan yang Diperiksa Bukan Melalui Simwaskan (manual)
1	Pangkalan PSDKP Bitung	683
2	Wilker PSDKP Amurang	9
3	Wilker PSDKP Belang (Mitra)	81
4	Wilker PSDKP Labuan Uki	48
5	Wilker PSDKP Kema (Minut)	53
6	Wilker PSDKP Tumumpa	144
7	Satwas. SDKP Gorontalo Utara	42
8	Wilker PSDKP Toli-toli	12
9	Satwas. SDKP Gorontalo	126
10	Wilker PSDKP Molibagu	47
11	Wilker PSDKP Parigi Moutong	32
12	Wilker PSDKP Tojo Una-una	36
13	Wilker PSDKP Boalemo	29
14	Wilker PSDKP Pohuwato	12
15	Satwas. SDKP Kendari	414
16	Wilker PSDKP Banggai	12
17	Wilker PSDKP Banggai Keplut	81
18	Wilker PSDKP Bau-bau	31
19	Wilker PSDKP Kolaka	31
20	Wilker PSDKP Pasar Wajo	35
21	Wilker PSDKP Torobulu	7
22	Wilker PSDKP Wakatobi	55
23	Satwas. SDKP Makassar	303
24	Wilker PSDKP Bone	254
25	Wilker PSDKP Palopo	16
26	Satwas. SDKP Takalar	427
27	Wilker PSDKP Bulukumba	199
28	Wilker PSDKP Selayar	32
29	Wilker PSDKP Sinjai	863
30	Satwas. SDKP Mamuju	90
31	Wilker PSDKP Donggala	89
32	Wilker PSDKP Majene	45
33	Wilker PSDKP Mamuju Utara	4
34	Wilker PSDKP Polman	11
Jumlah Unit Kapal Perikanan		4.322

Target capaian jumlah kapal perikanan yang diperiksa tahun 2021 sebanyak

3450 unit, realisasi pemeriksaan melalui simwaskan sebanyak 3255 unit dan tidak melalui simwaskan 4322 unit kapal perikanan total kapal yang selesai diperiksa kepatuhannya adalah 7,577 unit kapal perikanan dengan persentase penyelesaian pemeriksaan 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 3211 unit kapal perikanan terjadi peningkatan jumlah unit kapal perikanan yang diperiksa menjadi 7.577 unit atau mengalami peningkatan sebesar 120%. Kendala yang dihadapi oleh Pangkalan PSDKP Bitung yaitu masih banyak Wilker PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum bisa menerapkan SIMWASKAN dalam pelayanan penerbitan SLO karena terkendala jaringan internet di beberapa lokasi sehingga penerbitan SLO masih menggunakan form manual.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 316.265.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp. 307.795.700 realisasi anggaran sebesar 97,32%.

4. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya

Berdasarkan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan, yang dimaksud usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, perbesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran hasil ikan pembudidayaan. Lokasi pengawasan pembudidayaan ikan antara lain di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI), sentra-sentra pembudidayaan ikan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, tempat-tempat pemasukan/pengeluaran ikan untuk kepentingan pembudidayaan, dan produsen, importir/eksportir, distributor, toko pakan/obat ikan.

Informasi indikator kinerja pada tahun 2021 telah dilakukan pengawasan terhadap 72 (tujuh puluh dua) pelaku usaha pembudidayaan ikan dari target pemeriksaan 71 (tujuh puluh satu) pelaku usaha, rincian kegiatan sebagai berikut:

1. UD. Windu yang beralamat di Desa Mootinelo, Kwandang Gorontalo jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan dokumen perizinan belum ada, pengawas perikanan menghimbau kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pengurusan izin usaha.
2. PT. Arta Samudra yang beralamat di Kelurahan Tandurusa, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air laut sistem Longline /tali rentang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai. hasil pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang

- ada. proses produksi sementara ini tidak ada dikarenakan alasan operasional akibat pandemi.
3. Samin Djonga yang beralamat di Desa Leboto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan belum memiliki izin yang di persyaratkan, tidak terdapat penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam usaha budidaya.
 4. Hamid Mbuinga yang beralamat di Desa Alata Karya, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan belum memiliki izin yang di persyaratkan, tidak terdapat penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam usaha budidaya.
 5. Sain Djonga yang beralamat di Desa Leboto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan belum memiliki izin yang di persyaratkan, tidak terdapat penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam usaha budidaya.
 6. Muksin Usmanyang beralamat di Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan belum memiliki izin yang di persyaratkan, tidak terdapat penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam usaha budidaya.
 7. Pokdakan Gift Nusantara yang beralamat di Desa Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air tawar sistem Jaring Tancap, Tambak, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
 8. Pokdakan Pisces yang beralamat di Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan kelompok pembudidaya ikan Pisces belum memiliki SIUP ataupun TPUPI. pelaku usaha dihimbau untuk melengkapi usahanya menggunakan SIUP/TPUPI.
 9. Pokdakan Mina Jaya Lestari yang beralamat di Moyag Induk, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air tawar hasil pemeriksaankelompok pembudidaya ikan mina jaya lestari belum memiliki SIUP ataupun TPUPI. pelaku usaha dihimbau untuk melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan berupa SIUP atau TPUPI.
 10. Pokdakan Tomoi yang beralamat di Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air tawar, hasil pemeriksaan kelompok pembudidaya ikan Tomoi belum dilengkapi dengan dokumen SIUP ataupun TPUPI. pelaku usaha dihimbau untuk melengkapi usahanya dengan SIUP/TPUPI.
 11. Pokdakan Bintang Tumendek yang beralamat di Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, jenis usaha

budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan kelompok pembudidaya ikan Bintang Tumendek belum dilengkapi dengan SIUP ataupun TPUP. pelaku usaha dihimbau untuk melengkapi usahanya dengan SIUP/TPUP.

12. Kamarudin Hamun yang beralamat di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan belum memiliki izin yang di persyaratkan, tidak terdapat penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam usaha budidaya.
13. CV. Vaname Bahari yang beralamat di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan perizinan sementara dalam proses pengurusan, menggunakan pakan yang direkomendasikan kkp dan tidak ditemukan penggunaan obat/bahan kimia.
14. Arifuddin yang beralamat di Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen perizinan dalam pengurusan dan layak direkomendasikan usaha budidaya udang skala kecil.
15. Pokdakan Ridam Raya yang beralamat di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang hasil pemeriksaan dokumen yang dimiliki berupa sertifikat pengukuhan kelompok pembudidayaan ikan. pelaku usaha dihimbau untuk mengurus dokumen perizinan usahanya.
16. Upr Mina Rahayu yang beralamat di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara, jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang hasil pemeriksaan dokumen dalam proses kepengurusan dan layak direkomendasikan menjadi usaha pembenihan.
17. Masri yang beralamat di Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan. petugas menghimbau kepada pelaku usaha untuk melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
18. PT. Selat Buton yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya Komp. Villa Mas Blok N No. 4, Rt.002 Rw.004, Kelurahan Kassi - Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Longline /tali rentang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
19. Balo yang beralamat di Desa Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan usaha budidaya udang belum memiliki tanda pencatatan usaha

- pembudidayaan ikan (TPUPI). usaha pembudidayaan udang menggunakan pakan buatan dan pakan alami dan tidak menggunakan obat kimia dan biologi dalam kegiatan budidaya udang.
20. PT. Sonok Lestari Mas yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No. 60, Kota Bitung Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air laut sistem Karamba, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
 21. PT. Manakara Sakti Abadi yang beralamat di Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air payau siste Tambak ,hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai, dimana ipal tergolong baik dengan tingkat produksi yang tinggi. unit pembudidaya tersebut merupakan usaha budidaya dengan sistem intensif dengan model kerjasama antara perusahaan/investor dengan kelompok/pemilik lahan dengan masyarakat lokal.
 22. PT. Vaname Kasoloang Sejahtera yang beralamat di Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen perizinan belum diketahui dengan alasan dokumen tersebut disimpan oleh pemilik. pelaku usaha dihimbau untuk dapat menunjukkan dokumen SIUP dan minimal meninggalkan fotocopynya di lokasi usaha.
 23. Pokdakan Saleko Mammesa yang beralamat di Dusun Saleko, Desa Batatangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulwesi Barat, jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai. sistem budidaya yang digunakan adalah kolam bioflok.
 24. PT. Randomayang Tambak Lestari yang beralamat di Dusun Salunggaluku, Dusun Batio, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai, dimana pengelolaan limbah menggunakan ipal tergolong baik dengan tingkat produksi tinggi.
 25. Pokdakan Moawota Hele yang beralamat di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan pelaku usaha merupakan petambak kecil dengan sistem budidaya tradisional. dokumen perizinan yang dimiliki berupa surat keterangan usaha (SKU) yang diterbitkan oleh pemerintah desa mootilango, kecamatan duhiadaa, kabupaten pohuwato.
 26. Pokdakan Al Hijrah yang beralamat di Dusun Upt, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan pelaku usaha merupakan pembudidaya tambak skala kecil dengan sistem tradisional. dokumen perizinan yang dimiliki

- berupa surat keterangan usaha (sku) yang diterbitkan oleh pemerintah desa mootilango, kecamatan duhiadaa, kabupaten pohuwato.
27. PT. Esaputlii Prakarsa Utama yang beralamat di Jl. H. Andi Mappanyuki No. 9 & Kupa Desa Jalange, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
 28. Alimudin Juja yang beralamat di Desa llangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan usaha budidaya belum memiliki izin, pelaku usaha dihimbau segera mengurus perizinan.
 29. Kasmawati Sain yang beralamat di Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan usaha budidaya belum memiliki izin, pelaku usaha dihimbau segera mengurus perizinan.
 30. Sain Karim yang beralamat di Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan usaha budidaya belum memiliki izin, pelaku usaha dihimbau segera mengurus dokumen perizinan.
 31. Hamzah yang beralamat di Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan usaha budidaya belum memiliki tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI). pelaku usaha dihimbau untuk mengurus dokumen perizinan.
 32. Ahmad yang beralamat di Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan usaha budidaya belum memiliki tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI). pelaku usaha dihimbau untuk mengurus dokumen perizinan tersebut.
 33. Pokdakan Noby Taruna Remaja yang beralamat di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo Gorontalo, jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan pelaku usaha merupakan pembudidaya ikan bioflok. dokumen yang dimiliki berupa dokumen pengukuhan kelompok dari kemenkumham.
 34. Andi Ruskati Radjab yang beralamat di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan pelaku usaha belum memiliki nib.
 35. PT. Sarana Hatchery Abadi yang beralamat di Bungung Pandang, Desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen perizinan berupa SIUP sudah

- habis masa berlaku. pelaku usaha dihimbau untuk segera mengurus izin usaha melalui oss.
36. PT. Celebes New Hope yang beralamat di Kompleks Marina Plaza Blok B No. 27 Kota Manado, Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air laut sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
 37. CV. Mutiara Bantaeng yang beralamat di Kampung Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
 38. Pokdakan Bandeng Jaya yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen SIUP dalam pengurusan melalui aplikasi oss di dpmptsp sulawesi tengah di kota palu.
 39. PT. Tumpaan Makuri Mandiri yang beralamat di Lingkungan li, Kel. Kinilow Satu, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Prov. Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air laut sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
 40. PT. Sinar Barru Prima yang beralamat di Jl. Poros Pare-Pare Makassar, Jalange, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Kolam Air Tenang, Tambak, hasil pemeriksaan dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
 41. CV. Surya Seafood yang beralamat di Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air laut sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
 42. H. Arman Maulana yang beralamat di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payausistem Tambak, hasil pemeriksaan belum memiliki SIUP di bidang usaha pembudidayaan ikan dan disarankan untuk melengkapi dokumen yang sesuai ketentuan yang berlaku.
 43. Hery Liogu yang beralamat di Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara jenis usaha budidaya air tawar sistem Jaring Tancap, hasil pemeriksaan pelaku usaha terdaftar di dinas perikanan kabupaten minahasa dan surat keterangan usaha dari kepala desa eris.
 44. Frans Karundeng yang beralamat di Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air sistem Jaring Tancap, hasil pemeriksaan pelaku usaha terdaftar di dinas perikanan kabupaten minahasa.

45. UD. Jems yang beralamat di Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air tawar sistem Jaring Tancap, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai
46. PT. Timor Otsuki Mutiara yang beralamat di Gmt Building Lantai 4, Jl. Wijaya I No. 5, Kebayoran Baru Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Longline /tali rentang, Karambahasil pemeriksaan dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
47. PT. Kencana Suppa Permai yang beralamat di Desa Lero Menralo Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap da sesuai.
48. PT. Bosowa Suppa Shrimp Farming yang beralamat di Rukujanung, Desa Majannang Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Kolam Air Tenang, hasilpemeriksaan dokumen perizinan lengkap, masih berlaku dan sesuai.
49. PT. Sunli Jaya Lestari yang beralamat di Petang, Kel/Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen perizinan telah habis masa berlakunya. pelaku usaha dihimbau untuk segera mengurus dokumen perizinan tersebut.
50. CV. Harjo Anugerah Sejahtera yang beralamat di Petang,Desa/Kel. Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen perizinan tidak lengkap dikarenakan SIUP sudah habis masa berlaku.
51. CV. Arung Bonto Bahari yang beralamat di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten BulukumbaSulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan belum memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan. penggunaan sarana produksi sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
52. CV. Glori Jaya Sakti yang beralamat di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten BulukumbaSulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan masa berlaku SIUP telah habis, diinstruksikan agar segera memperpanjangnya dan penggunaan sarana produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
53. PT. Marina Indo Prima yang beralamat diKelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten BulukumbaSulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan masa berlaku SIUP telah habis, diinstruksikan agar segera memperpanjangnya. penggunaan sarana produksi sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

54. H. Samsul Mahmud yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan belum memiliki izin dikarenakan luas lahan kurang 2 ha.
55. Hasanuddin yang beralamat di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
56. Hj. Nur Rahma Tahuddin yang beralamat di Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, jenis usaha budidaya air laut sistem Tambak hasil pemeriksaan tidak ditemukan pakan dan obat ikan yang dapat membahayakan manusia.
57. H. Sule yang beralamat di Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan segera melengkapi dokumen perizinan di dinas terkait.
58. Bandeng Sejahtera Manakku yang beralamat di Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan melengkapi dokumen perizinan di dinas terkait.
59. Sinar Balangga yang beralamat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
60. Catfish Bulila yang beralamat di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Gorontalo, jenis usaha budidaya air tawar sistem Kolam Air Tenang hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai.
61. Abdul Rahmanyang beralamat di Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan untuk melengkapi dokumen perizinan di dinas terkait.
62. Sul kifli yang beralamat di Kelurahan Maccinibati, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan untuk melengkapi dokumen perizinan di dinas terkait.
63. Masita yang beralamat di Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Longline /tali rentang, hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan mendaftarkan kegiatan perikanan di dinas terkait.
64. Pabi yang beralamat di Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air payau

- sistem Tambak, hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan melengkapi dokumen perizinan di dinas terkait.
65. Hasniah yang beralamat di Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Longline /tali rentang, hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan segera mendaftarkan kegiatan usaha perikanan ke dinas terkait.
 66. Saban yang beralamat di Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, jenis usaha budidaya air laut sistem Longline /tali rentang, hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap, direkomendasikan untuk melengkapi dokumen perizinan.
 67. UD. Riski Samudra Jaya yang beralamat di Jl. Tadulaka, Kilangan, Banggai Sulawesi Tengah, jenis usaha budidaya air laut sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen perizinan (nib, SIUP, sckib, sertifikat instalasi karantina ikan) lengkap dan masih berlaku.
 68. Pokdakan Cahaya Lestari yang beralamat di Dusun Tengah Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Gorontalo, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan. dokumen yang dimiliki berupa surat keterangan usaha dari desa. disarankan untuk segera melakukan pengurusan izin usaha.
 69. PT. Yongning Internasional Investasi yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Dusun 3, Kelurahan Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, jenis usaha budidaya air payau sistem Tambak, hasil pemeriksaan perusahaan ini berstatus penanaman modal asing (PMA) melakukan kegiatan pembesaran jenis udang vannamei dan windu. dokumen perizinan berusaha lengkap.
 70. UD. Golden Ocean Aquarium yang beralamat di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, jenis usaha budidaya air laut sistem Aquarium, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 71. UD. Saruni Parimo yang beralamat di Jl. Malonda, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, jenis usaha budidaya air payau sistem Kolam Air Tenang, hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sesuai. kegiatan usaha budidaya pembenihan udang vannamei sesuai dengan dokumen perizinan yang ada.
 72. Koperasi Nila Star Otanaha yang beralamat di Jl. Usman Isa, Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Dembe Satu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, jenis usaha budidaya air tawar sistem Jaring Tancap, hasil pemeriksaan pelaku usaha dihimbau untuk mengurus dokumen perizinan usaha budidaya ke Dinas terkait.

Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diperiksa tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah usaha budidaya yang diperiksa sebanyak 72 unit usaha, naik 24,13% jika dibandingkan dengan capaian pemeriksaan tahun 2020 sebanyak 58 unit usaha. Kenaikan capaian disebabkan karena bertambahnya target capaian output unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa dari tahun sebelumnya sebesar 58 unit usaha.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 174.752.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp. 165.867.170, realisasi anggaran sebesar 94,92%.

Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat didukung oleh IKU Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Berdasarkan nilai pada perhitungan efisiensi anggaran Sasaran Kegiatan ini adalah senilai 54,8% yang mana anggaran yang tersedia dapat mendukung tercapainya target yang lebih besar dari pada yang telah ditentukan.

IKU3 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI/ADUAN POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian persentase IKU ini adalah 100%, dari target 71% sehingga capaian persentase IKU tahun 2021 adalah 120%. Pelaksanaan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung di tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) aduan masyarakat dari target 2 (dua) penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 120% persentase capaian tetap. Namun dari jumlah aduan yang ditindak lanjuti bertambah 50%.

Penyelesaian aduan masyarakat yang ditindak lanjuti adalah sebagai berikut.

1. Pengaduan masyarakat yang berasal dari Kepala Desa Bobu atas nama Rusli Timpas, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Rusli Timpas melaporkan adanya kegiatan penangkapan ikan di perairan Pulau Peling dengan menggunakan bom ikan melalui telepon seluler kepada personil Wilker PSDKP Bangkeplut, kemudian Tim Gabungan dari PSDKP Bangkeplut bersama Personil Pos POL AIR banggai

Laut bergerak menuju lokasi yang dilaporkan, setibanya dilokasi kejadian terduga pelaku sudah tidak ada ditempat dan hanya ditemukan barang bukti ikan hasil pengeboman yang sudah diamankan oleh aparat Desa Bobu.

Tim Gabungan PSDKP dan POL AIR melakukan pencarian terduga tersangka ke pesisir pantai sampai ke daratan, namun terduga pelaku tidak ditemukan sehingga tim memutuskan untuk Kembali ke kantor dan tetap berkoordinasi denganpelapor. Pada hari minggu tanggal 11 April 2021 Kepala Desa Bobu Kembalimelaporkan bahwa terduga pelaku telah ditemukan oleh aparat Desa Bobu di gunung Taipa dan sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bobu. Tim Gabungan Kembali bergerak menuju lokasi kediaman Kepala Desa Bobu Bapak Rusli Timpas dan mengamankan terduga pelaku sebanyak 3 orang untuk diproses lebih lanjut oleh PPNS Pangkalan PSDKP Bitung. Berdasarkan pemeriksaan terhadap 3 orang yang diamankan telah ditetapkan 2 orang sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

2. Pengaduan masyarakat yang kedua yang telah ditindak lanjuti adalah pengaduan dari warga masyarakat Kecamatan Bunta atas nama M. Ilham sedang melakukan perjalanan dari Bunta menuju Luwuk menggunakan motor mengaku mendengar suara ledakan di perairan daerah desa Huhak, kecamatan Pagimana, pelapor menghentikan kendaraanya kemudian mengambil foto dan video perahu-perahu nelayan yang dicurigai melakukan pengeboman ikan. kemudian foto-foto dan video tersebut langsung dilaporkan kepada petugas Wilker PSDKP Banggai sdr. Nur Taufik melalui Whatsapp dan telepon pada sekitar pukul 12.00 WITA, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Pengawas Perikanan (POLSUS PWP3K) Pangkalan PSDKP Bitung dan Wilker PSDKP Banggai melakukan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) ke lokasi. Petugas mencari lokasi sesuai dengan foto-foto dan lokasi yang dilaporkan kemudian melakukan dokumentasi. Selanjutnya petugas mendatangi desa terdekat dengan lokasi guna mencari warga/nelayan yang dapat dimintai informasi dan keterangan terkait laporan tersebut. Wawancara dilakukan kepada saudara Elton (warga desa Huhak, kec. Pagimana) yang berprofesi sebagai nelayan. Beliau mengaku belum pernah mendengar suara ledakan bom di perairan setempat, namun beliau sering menjumpai aktifitas penangkapan ikan menggunakan kompressor yang dilakukan oleh nelayan Bajo dari desa Jaya Bakti, kecamatan Pagimana. Aktifitas biasanya dilakukan pada malam hari dengan hasil tangkapan berbagai macam jenis ikan dengan kondisi utuh (tanpa luka) dalam jumlah banyak (1 bak

pickup dalam 1 malam) yang kemungkinan dikirim ke pasar Pagimana (ada indikasi BIUS ikan). Pernah juga dijumpai aktifitas jual beli penyu di daerah itu yang dilakukan juga oleh nelayan-nelayan tersebut. Kemudian, petugas meminta nomor kontak dan memohon kerjasama dengan pak Elton (nomor telepon 081341066908) untuk memberikan informasi lebih lanjut. Pendekatan dan kerjasama terhadap warga masyarakat di daerah rawan kegiatan *destructive fishing* dapat terus dilakukan dan dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang baik dan akurat. Informasi yang didapat, diharapkan dapat membantu kegiatan peangulangan dan pemberantasan *destructive fishing* secara masiv.

3. Menindaklanjuti Surat dari Bupati Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Laporan terkait *Destructive Fishing* Nomor : 523/245/2021 tanggal 26 Juli 2021, terhadap Laporan/Pengaduan dengan cara pengeboman dan pembiusan ikan yang terjadi hampir cukup intens yang dilakukan oleh oknum nelayan tepatnya di sepanjang pesisir Perairan Laut Kabupaten Kolaka Utara, Pangkalan PSDKP Bitung melalui Satwas SDKP Kendari menindak lanjuti aduan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dilokasi Perairan Kab. Kolaka Utara.

Berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari Pengawas WP3K, Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara yang membidangi masalah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil, diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa memang benar di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Kolaka Utara marak terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang telah berlangsung lama,
- b. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana kewenangan pengawasan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah Provinsi, maka pengawasan di tingkat kota/kabupaten mengalami kekosongan dan hal tersebut menjadi salahsatu faktor yang menyebabkan kembali maraknya aktifitas penangkapan ikan menggunakan bom.
- c. Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan pembinaan/himbauan terhadap masyarakat nelayan tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap terlarang (bahan peledak/bom ikan)
- d. Perlunya dilakukan penegakan hukum secara optimal untuk memberikan

efek jera dan menghilangkan kesan “pembiaran” oleh aparat penegak hukum terhadap aktivitas illegal fishing yang telah dilakukan oleh nelayan pebom ikan selama bertahun-tahun serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aktivitas penangkapan ikan yang telah dilakukannya merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 12.600.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp.12.000.000,- realisasi anggaran sebesar 95.24%

**Sasaran Kegiatan 4:
Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP**

IKU Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP terdiri dari (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 10.998.841.000 dan realisasi tahun 2021 Rp 10.844.354.117, realisasi anggaran sebesar 98,59%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran memiliki nilai efisiensi sebesar 8,7%, hal ini menunjukkan semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-4 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IKU4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2021 dari target 1,79% tercapai 2,44% dengan persentase capaian kinerja 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 target capaian mengalami kenaikan target sebesar 1,18%, hal ini dibarengi dengan penambahan target hari operasi menjadi 129 HO dan terealisasi 129 HO. sementara tahun 2020 target hari operasi untuk Kapal Pengawas adalah 100 HO.

Tabel 14. Perbandingan target Tahun 2021 dengan Renstra tahun 2024

IDIKATOR KINERJA	2021		%	2024	
	TARGET	REALISASI		TARGET	%
Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	1,79	2,44	120	1,26	120

Tabel 15. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Tahun 2021

UPT PSDKP	Kapal Pengawas	Total Hari	Jam Operasi (jam) (t)	Kecepatan Dinas (NM/jam) (V)	Jangkauan Efektif Radar (NM) (d)	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan (Xkp) NM2 (d.V.t.Fwpp.Fkp)	% Cakupan
Pangkalan PSDKP Bitung	Hiu 02	134	1468,5	15	15	0,40	0,20	26.433,00	1,37%
	Hiu 05	123	1145	15	15	0,40	0,20	20.610,00	1,07%
Persentase capaian Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Tahun 2021									2,44 %

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 9.228.121.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 9.185.296.828 realisasi anggaran sebesar 99,53%.

IKU5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. pada tahun 2021 dari target 0.42% tercapai 0.48% dengan persentase capaian kinerja 114,29%. jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang realisasi capainnya 0,51%, tahun ini mengalami penurunan sekitar 0,03% disebabkan karena adanya penghematan anggaran dan pengurangan hari operasi speed boat dilingkup pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.770.720.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 1.659.057.289 realisasi anggaran sebesar 93,69%.

Tabel 16. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

No.	NAMA KAPAL	Hari Operasi (hari)	Lama Waktu Pengawasan (jam)	Faktor Koreksi Speedboat (Fsb)	Cakupan (Xsb) (NM2)	Luas WPP NRI (NM2)	Cakupan (%)
			t	Fsb	d*v*t*Fsb	A	X/A
1	Albacore 01	39	189	0,1	756	1.928.506	0,0392%
2	Dolphin 03	21	114	0,1	456	1.928.506	0,0236%
3	Dolphin 19	20	124,2	0,1	497	1.928.506	0,0258%
4	Dolphin 26	21	117	0,1	468	1.928.506	0,0243%
5	Napoleon 30	32	246	0,1	984	1.928.506	0,0510%
6	Napoleon 31	42	294	0,1	1176	1.928.506	0,0610%
7	Napoleon 56	21	106	0,1	424	1.928.506	0,0220%
8	RIB/Sea Rider 06	37	182	0,1	728	1.928.506	0,0377%

9	Rubber Boat Bone	24	141	0,1	564	1.928.506	0,0292%
10	Rubber Boat Kendari	20	110	0,1	440	1.928.506	0,0228%
11	Rubber Boat Luwuk Banggai	20	90	0,1	360	1.928.506	0,0187%
12	Rubber Boat Mamuju Utara	20	109,8	0,1	439	1.928.506	0,0228%
13	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	32	164	0,1	656	1.928.506	0,0340%
14	Rubber Boat Selayar	21	109	0,1	436	1.928.506	0,0226%
15	Rubber Boat Takalar	18	85,1	0,1	340	1.928.506	0,0177%
16	Rubber Boat Wakatobi	20	119	0,1	476	1.928.506	0,0247%
		408	2300,1				0,48%

**Sasaran Kegiatan 5 :
Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP**

Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Pada tahun 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 18 unit armada pengawasan yang dirawat yaitu 2 unit Kapal Pengawas, 7 unit Speed Boat, 1 unit Rigid Inflatable Boat dan 8 unit Rubber Boat. Target penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan adalah 100% dan realisasi kegiatan adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 2.365.382.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 2.353.323.644 realisasi anggaran sebesar 99,49%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran dengan nilai efisiensi 0,5%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-5 tercapai sesuai target dengan menggunakan alokasi anggaran yang tersedia.

IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Kegiatan Perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung meliputi kegiatan

1. Perawatan rutin

Perawatan rutin adalah perawatan konstruksi yang berada di atas permukaan

air laut dan dilakukan setiap hari secara teratur. Perawatan ini bersifat rutin dan dapat dilakukan oleh awak speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pekerjaan yang termasuk di dalam kegiatan perawatan rutin yaitu: 1) pembersihan dan pengecatan konstruksi yang berada diatas permukaan laut; 2) pendempulan dan laminasi aluminium/fiber yang rusak; 3) pencucian badan speedboat dari sekrap tiram, kotoran, dan binatang laut yang menempel; 4) perawatan alat navigasi, alat komunikasi, alat keselamatan, mesin dan kelengkapannya, kelistrikan.

2. Perawatan darurat

Perbaikan yang dilakukan jika rigid inflatable boat, dan rubber boat mengalami kerusakan pada sistem permesinan, konstruksi, lambung dan alat navigasi lainnya sehingga membutuhkan komponen atau peralatan baru untuk menggantikan komponen atau peralatan lama yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

3. Suku Cadang

Persediaan suku cadang yaitu merupakan salah satu bagian dari pemeliharaan dan persediaan yang perlukan oleh armada pengawasan, yang disimpan untuk digunakan pada mesin atau perlengkapan ketika membutuhkan perbaikan atau penggantian.

4. Docking

Docking kapal dilakukan biasanya bertujuan untuk keperluan pemeliharaan kapal seperti memeriksa dan memperbaiki kerusakan, pengecatan badan kapal serta membersihkan badan kapal di bawah garis air. Terdapat survey periodik di dunia perkapalan, salah satunya Docking Survey (Survey Penedokan) yang digunakan untuk pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan komponen bagian luar dari sistem penggerak, kondisi lambung di bawah garis air dan perlengkapan penutup mesin.

Target capaian kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah 100% dan realisasi capaian 100% dengan rincian 2 unit Kapal Pengawas, 7 unit Speed Boat, 1 unit Rigid Inflatable Boat dan 8 unit Rubber Boat.

Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 6 (SK-6) Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan didukung oleh 2 IKU yaitu IKU Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan IKU penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal lingkup pangkalan PSDKP Bitung.

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;

Penilaian atas perkembangan tahapan penyidikan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berpedoman kepada KUHP, UU Perikanan, UU PWP3K, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 805.545.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 795.646.900 realisasi anggaran sebesar 98,77%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran dengan nilai efisiensi 1,2%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-6 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target capaian kinerja untuk IKU ini adalah 93% dan tercapai 100% sehingga capaian kinerja IKU penyelesaian penanganan perkara adalah 107,53%.

Target capaian IKU ini adalah 16 perkara TPKP dengan target penyelesaian penanganan perkara 93%. Pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Bitung telah menyelesaikan penanganan 16 perkara TPKP. 16 perkara telah dinyatakan Inkracht dengan capaian penyelesaian 100%, capaian kinerja sebesar 107,53%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 adalah 90,63%. terjadi kenaikan sebesar 16,90%. Hal ini disebabkan karena perubahan target kinerja pada tahun 2020 target capaiannya 100%, dan pada tahun 2021 target kinerja penyelesaian TPKP adalah 93%.

Tabel 17. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2024

IDIKATOR KINERJA	2021		%	2024	
	TARGET	REALISASI		TARGET	%
Persentase Penyelesaian Penyidikan Tpkp Lingkup Pangkalan Psdkp Bitung	93	100	107,53	100	100

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 426.055.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 425.139.450 realisasi anggaran sebesar 99,78%

Informasi kinerja penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahu 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersangka AL IMRAN Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 121/Lan.5/PW.510/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.
2. Tersangka RIKIANTO Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981 proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 122/Lan.5/PW.510/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.
3. Tersangka ARDIANSYAH Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981 proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 123/Lan.5/PW.510/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.
4. Tersangka RAHMAN alias JUMRIN Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen perikanan, Melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) dan/atau pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses hukum telah selesai dengan

- penyerahan berkas Tahap II nomor 505/Lan.5/PW.510/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.
5. Tersangka SUDIRMAN alias DIRMAN Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen perikanan, Melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) dan/atau pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 506/Lan.5/PW.510/III/2021, tanggal 08 Maret 2021.
 6. Tersangka MUDDING Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 100B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 510/Lan.5/PW.510/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.
 7. Tersangka JUMASRI Alias MABE Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 100B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 508/Lan.5/PW.510/III/2021 tanggal 08 Maret 2021
 8. Tersangka ANWAR Alias ALO Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 100B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 509/Lan.5/PW.510/ III/2021 tanggal 08 Maret 2021.
 9. Tersangka M A N I R Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100b Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 100B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang RI No 8 Tahun 1981, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 507/Lan.5/PW.510/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.

10. Tersangka BADWI Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen perikanan, Melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) dan/atau pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 10/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
11. Tersangka MOHAMAD Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen perikanan, Melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) dan/atau pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 11/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
12. Tersangka ANAS alias MOHAMAD ALANG Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa menggunakan dokumen perikanan, Melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) dan/atau pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 12/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
13. Tersangka ANDI bin ARIADI Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 13/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
14. Tersangka KAPTO KAILI Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 1325/Lan.5/PW.510/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
15. Tersangka IKBAL K Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar

Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 1326/Lan.5/PW.510/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

16. Tersangka SARTO B. MALA Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100B Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, proses hukum telah selesai dengan penyerahan berkas Tahap II nomor 1437/Lan.5/PW.510/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target capaian IKU penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 adalah 93%. capaian IKU ini adalah 100%, sehingga nilai capaian kinerja IKU ini adalah 107,53%. Pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Bitung telah menangani 12 Barang Bukti Kapal Perikanan dan 72 Awak Kapal dan semua proses hukumnya telah inkracht.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 275.490.000,- dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 268.741.189 realisasi anggaran sebesar 97,55%.

Tabel 18. Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

NO.	FOTO BARANG BUKTI	NAMA BARBUK	GT	TERSANGKA	STATUS HUKUM	KETERANGAN
1		Tanpa Nama	1	AL IMRAN	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik

2		KMN. INKAMINA-222/ TRIPLE 2	30	Rahman alias Jumrin	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
3		Tanpa Nama	1	Mudding	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
4		Tanpa Nama	1	Jumasri alias Mabe	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
5		Tanpa Nama	1	Manir	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
6		Tanpa Nama	1	Anwar alias Allo	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
7		KM. Kemitraan Daerah Tertinggal 01/ KPDT Kendari 01	37	Badwi	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
8		KM. Tomini Sejahtera	20	Mohamad	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
9		KM. Inka Mina - 742	34	Anas Bin Mohammad Alang	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
10		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Andi Bin Ariadi	INKRACHT	Rampas Negara

11		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Kpto Kaili, dkk.	INKRACHT	Rampas Negara
12		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Sarto B. Mala	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik

Tabel 19. Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Tahun 2021

No	NAMA KAPAL	NAMA AWAK KAPAL	WARGA NEGARA	TAHAP II	Tanggal TAHAP II		
1	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	AL IMRAN	INDONESIA	121/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021		
2		RIKIANTO	INDONESIA	122/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021		
3		ARDIANSYAH	INDONESIA	123/Lan.5/PW.510/I/2021	20 Januari 2021		
4	KM. INKAMINA 222/TRIPLE 2	RAHMAN alias JUMRIN	INDONESIA	505/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021		
5		SUDIRMAN alias DIRMAN	INDONESIA	506/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021		
6		TISON	INDONESIA	Dikembalikan ke pihak keluarga			
7		ARIF GADO	INDONESIA				
8		ABDUL MALIK UTULI	INDONESIA				
9		RUSTAM	INDONESIA				
10		RIZAL PRADITIA	INDONESIA				
11		HAENDRA WAHYUDI R.	INDONESIA				
12		SHARUDIN SALAWIALI	INDONESIA				
13		KAISAR	INDONESIA				
14		RIDWAN UTULI	INDONESIA				
15		ZUL FAHRIN	INDONESIA				
16		HENDRA GUNAWAN	INDONESIA				
17		FAISAL ADRIMAN MAHAUDIN	INDONESIA				
18		INDRAWAN	INDONESIA				
19		ACO DILA HAPA	INDONESIA				
20		TAKWA	INDONESIA				
21		ARIFIN T. RACHMAN	INDONESIA				
22		AMAN PAKAYA	INDONESIA				
23		PERAHU TANPA NAMA	MUDDING		INDONESIA	510/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
24		PERAHU TANPA NAMA	JUMASRI		INDONESIA	508/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
25		PERAHU TANPA NAMA	ANWAR alias ALO		INDONESIA	509/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021
26	PERAHU TANPA NAMA	MANIR	INDONESIA		507/Lan.5/PW.510/III/2021	08 Maret 2021	
27	KM. KEMITRAAN DAERAH TERTINGGAL 01/KPDT KENDARI 01	BADWI	INDONESIA		10/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021	
28		IRMAN ATUKA	INDONESIA	Dikembalikan ke pihak keluarga			
29		SAKIR	INDONESIA				
30		ARJUN IGIRISA	INDONESIA				
31		ABDUL RAHMAN	INDONESIA				
32		HENDRA GUNAWAN	INDONESIA				
33		ANTO	INDONESIA				
34		MUSRAN	INDONESIA				
35		FARID MALUSINA	INDONESIA				
36		HERMANSYAH	INDONESIA				
37	FADLI	INDONESIA					
38	KM. TOMINI SEJAHTERA	MOHAMAD	INDONESIA	11/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021		
39		ALAMSYAH DJ. HANO	INDONESIA	Dikembalikan ke pihak keluarga			
40		ABD. RAHMAN	INDONESIA				
41		FAHRUL TONGGOLO					
42		RUSLAN					
43		USMAN RAHIM					
44		ZAENAL					
45		FADLI					

46		ASTAR			
47		JUNAIDI			
48		SYAIFUDIN			
49		ASMAL			
50	KM. INKA MINA 742	ANAS BIN MOHAMMAD ALANG	INDONESIA	12/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021	23 April 2021
51		ARDIANTO	INDONESIA	Dikembalikan ke pihak keluarga	
52		ARWAN A.	INDONESIA		
53		SAHRIL	INDONESIA		
54		DIRWANTO	INDONESIA		
55		ARMAN	INDONESIA		
56		FAISAL	INDONESIA		
57		BAHTIAR	INDONESIA		
58		ASRI A. ASRIN TING	INDONESIA		
59		SAIPUL	INDONESIA		
60		ADI KURNIAWAN	INDONESIA		
61		BAGONG	INDONESIA		
62		GUNAWAN MUH. GUNTUR	INDONESIA		
63		KAISAR	INDONESIA		
64		DARWIS	INDONESIA		
65		MULIADI	INDONESIA		
66		HAMDAR HATTAB HADDAD	INDONESIA		
67		ASRUN	INDONESIA		
68		RAMDAN LAMELE	INDONESIA		
69	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	ANDI BIN ARIADI	INDONESIA		
70	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	KAPTO KAILI	INDONESIA	1325/Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021
71		IKBAL K	INDONESIA	1326/Lan.5/PW.510/VI/2021	14 Juni 2021
72	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	SARTO B. MALA	INDONESIA	1439/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021	15 Juni 2021

Sasaran Kegiatan 7:

Tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 11 (sebelas) indikator kinerja dan semua targetnya dapat tercapai sesuai target. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp18,952,583,000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp18,112,337,849 realisasi anggaran sebesar 95,57%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran dengan nilai efisiensi 4,6% dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SK-7 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SK-7 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IKU9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap Triwulan. Berdasarkan pola akumulasi pada indikator kinerja ini adalah posisi akhir sehingga Indeks IKM layanan SLO yang digunakan sebagai capaian kinerja tahun 2021 adalah 84,31 dari target 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan SLO adalah 105,39%.

Tabel 20. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW IV tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,493	sangat baik	0,388	87,313
U2	Prosedur	3,198	baik	0,355	81,452
U3	Waktu Pelayanan	3,137	baik	0,348	78,425
U4	Biaya/Tarif	3,613	sangat baik	0,401	100,000
U5	Produk Layanan	3,226	baik	0,358	80,645
U6	Kompetensi Pelaksana	3,366	sangat baik	0,374	82,836
U7	Perilaku Pelaksana	3,418	sangat baik	0,379	85,448
U8	Sarana dan Prasarana	3,336	sangat baik	0,370	76,866
U9	Pengaduan Masyarakat	3,597	sangat baik	0,399	89,925
Rata - Rata Semua Unsur				3,372	
Keterangan : - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - IKR = Indeks Kepuasan Responden - *) = Jumlah NRR IKR tertimbang - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111					
IKR TERHADAP RSS :				84,31	
Mutu Pelayanan : A (Sangat Memuaskan) : 81,26 - 100,00 B (Memuaskan) : 62,51 - 81,25 C (Kurang Memuaskan) : 43,76 - 62,50 D (Tidak Memuaskan) : 25,00 - 43,75					

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 102 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,372 dengan angka Indeks sebesar 84,31 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00. Capaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan 8,19 poin, dari 92,50 pada tahun lalu menjadi 84,31 atau 10,23% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan nilai dari 9 unsur penilaian pelayanan masyarakat diketahui ada 8 unsur yang mengalami penurunan nilai dan 1 unsur yang mengalami peningkatan. Dari perbandingan ini menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar Pangkalan PSDKP Bitung dapat terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik terhadap pengguna jasa layanan SLO

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Desember 2021 adalah Rp 19.050.000 realisasi anggaran tahun 2021 adalah 100%.

**IKU10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI
(LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN) LINGKUP PANGKALAN
PSDKP BITUNG**

Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI tahun 2021 adalah 88,65 dari target 80, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan LVHPI adalah 110,81%. Capaian kinerja tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 karena merupakan IKU baru ditahun 2021.

Tabel 17. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW IV tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,474	sangat baik	0,386	86,842
U2	Prosedur	3,342	sangat baik	0,371	85,526
U3	Waktu Pelayanan	3,263	sangat baik	0,362	81,579
U4	Biaya/Tarif	3,711	sangat baik	0,412	100,000
U5	Produk Layanan	3,421	sangat baik	0,380	85,526
U6	Kompetensi Pelaksana	3,553	sangat baik	0,394	88,158
U7	Perilaku Pelaksana	3,579	sangat baik	0,397	89,474
U8	Sarana dan Prasarana	3,658	sangat baik	0,406	84,211
U9	Pengaduan Masyarakat	3,947	sangat baik	0,438	98,684
Rata - Rata Semua Unsur				3,546	
Keterangan : - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - IKR = Indeks Kepuasan Responden - *) = Jumlah NRR IKR tertimbang - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111					
IKR TERHADAP RSS :				88,65	
Mutu Pelayanan : A (Sangat Memuaskan) : 81,26 - 100,00 B (Memuaskan) : 62,51 - 81,25 C (Kurang Memuaskan) : 43,76 - 62,50 D (Tidak Memuaskan) : 25,00 - 43,75					

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan LVHPI di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 28 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,546 dengan nilai Indeks sebesar 88,65 dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam interval nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 19.050.000 realisasi anggaran sebesar 100%.

IKU11 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Gambar 5 Penilaian WBK tahun 2021

A. KOMPONEN PROSES PENGUNGKIT	Bobot (Rata)	Bobot WBK (60% x Bobot)	Bobot WBBM (40% x Bobot)	Capaian (Rata)	Persentase (%)	Keterangan
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	5,00	4,80	4,20	4,73	71,43	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
2. PENYATAAN PELAYANAN	7,00	4,20	6,25	4,86	69,43	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
3. PENYATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AKRABTUR	10,00	6,00	7,86	7,84	79,40	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	10,00	6,00	7,60	6,31	63,10	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	9,00	11,25	9,62	64,13	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIC	10,00	6,00	7,86	6,73	67,30	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
NILAI	60,00	36,00	40,00	42,79		
B. KOMPONEN HASIL						
1. TERJULUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI	20,00	18,00	18,00	19,33	96,65	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. NILAI SURVEI PERSEPSI KORUPSI (SURVEI EKSTERNAL)	18,00	13,50	13,50	14,33	95,53	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
3. PERSENJAJE TERJALAN HASIL REFORMISASI (INTERNAL DAN EKSTERNAL) YANG DITANDAIKAN LULU	9,00	5,00	6,00	6,00	100,00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
4. TERJULUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	20,00	16,00	18,00	18,00	94,00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
NILAI	40,00	34,50	38,50	38,13		
C. MEMENUHI LHKPN DAN LHKASN						
1. LHKPN YANG DISAMPUNGAN KE KIKI OLEH PENYELENGARA NEGARA	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. LHKASN YANG DISAMPUNGAN MELALUI APLIKASI SIHAKSA OLEH PNS	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
NILAI	100,00	70,00	81,00	80,92		

Capaian IKU Nilai WBK/WBBM pada Pangkalan PSDKP Bitung hasil penilaian mandiri dan direviu oleh Itjen KKP adalah 80,92 dari target capaian WBK 75. Dengan perolehan nilai tersebut maka capaian kinerja untuk IKU ini adalah 107,89%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya perbedaan output capaian, tahun 2020 target output kinerja adalah unit kerja yang berpredikat WBK sementara target output kinerja tahun 2021 adalah nilai.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini Rp16.800.000, realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp15.472.000 atau 92,10%.

IKU12 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin dari masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nilai kualifikasi sendiri diperoleh dari tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan bobot 25%). Nilai kompetensi diperoleh dari keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon) dengan bobot 40%. Nilai Kinerja dengan bobot 30% yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi

Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP. Nilai Disiplin berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin dengan bobot 5%).

Nilai capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan tahun 2021 adalah 74,76%, dari target pada 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 73%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 102,46%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 75,4% mengalami penurunan 0,64%. Penurunan tersebut diakibatkan kurangnya partisipasi sebagian pegawai dalam mengikuti pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai dalam kegiatan seminar maupun bimtek yang dilaksanakan secara luring maupun daring..

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 36.124.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 36.123.809,- atau 99,99%..

IKU13 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Rekonsiliasi Kinerja merupakan (Rapid Assesment) yang dilakukan Biro Perencanaan KKP dengan tujuan meningkatkan aspek pelaporan kinerja pada SAKIP sehingga KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit kerja. Indikator kinerja nilai Rekonsiliasi Kinerja merupakan implementasi dari Rekomendasi KemenPAN & RB terkait hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Perhitungan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja diperoleh dari akumulasi pada empat aspek, yaitu:

a) Aspek Kepatuhan

Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi, LKJ/LCK Triwulan, dan Data dukung) dengan bobot 25% dari nilai total dokumen;

b) Aspek Kesesuaian

Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, realisasi, dan informasi data dengan bobot 25% dari rata-rata kesesuaian;

c) Aspek Ketercapaian

Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (kesesuaian

dokumen pada kriteria kesesuaian target, realisasi, dan informasi data dengan bobot 30% dari rata-rata kesesuaian;

d) Aspek Ketepatan

Dilihat berdasarkan penyampaian LKJ tahunan pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dibandingkan dengan tanggal batas sesuai ND Karoren) dan penyampaian kepada atasan (tanggal Memo/surat pengantar penyampaian LKJ ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas pada PermenKP 68/2017). dengan bobot 30% dari rata-rata ketepatan.

Capaian nilai Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 adalah 97,89 dengan persentase capaian 108,77% dari target nilai 90, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 capaiannya 92,54 mengalami kenaikan 6,75%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan indikator penilaian yaitu penilaian aspek ketepatan.

Tabel 22. Hasil Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	111,56	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	27,89	20,00
Total Skor	97,89			

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 224.907.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 223.943.493 atau 99,57%.

IKU14 INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria baik bersifat manual, mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi inovasi dihasilkan menggunakan konsep plan do check action (PDCA) yaitu penggunaan 8 langkah dan 7 alat quality control inovasi dinilai tercapai apabila:

1. dirumuskan dan diselesaikan oleh tim GKT yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal psdkp
- 2 menggunakan konsep pdca,
- 3 menyelesaikan risalah inovasi sesuai format dan
- 4 mengikuti lomba inovasi dan psdkp tahun 2021

Capaian IKU Inovasi pada Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2021 adalah 1 Inovasi dari target IKU 1 Inovasi, sehingga capaian kinerja untuk IKU ini adalah 100%. Inovasi yang telah dirumuskan oleh tim GKT Pangkalan PSDKP Bitung telah menyelesaikan risalah sesuai format dan mengikuti lomba Inovasi tingkat Ditjen PSDKP. Dengan hasil capaian nilai 79,4 dan mendapatkan kategori gold.

Tabel 23. Hasil penilaian Loba Inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2021

NILAI SUB-KRITERIA 7B

NO	NAMA PESERTA	NILAI AKHIR	NILAI SUB-KRITERIA 7B	LINGKUP IDE BARU
KATEGORI GKM				
1	Dit PPSDP	87,8	8,93	Instansi
2	Dit PPSDK	86,8	8,68	Instansi
3	Stasiun PSDKP Cilacap	86,2	8,75	Instansi
4	Dit PP	85,9	8,58	Instansi
5	Dit POA	85,6	8,55	Instansi
6	Pangkalan PSDKP Jakarta	85,2	8,28	Instansi
7	Pangkalan PSDKP Benoa	84,6	8,45	Instansi
8	Pangkalan PSDKP Batam	83,9	8,13	Instansi
9	Sekretariat Ditjen PSDKP	82,5	7,93	Instansi
10	Pangkalan PSDKP Tual	81,1	8,08	Instansi
11	Komite	80,0	8,25	Instansi
12	Pangkalan PSDKP Bitung	79,4	8,00	Instansi
KATEGORI SS				
1	Lucky Rizki Rachmadi (Setditjen PSDKP)	84,1	8,88	Instansi
2	Zulfikar Afandy (Pangkalan PSDKP Tual)	79,7	7,85	Instansi
3	Muharamar Razak (Pangkalan PSDKP Jakarta)	79,3	7,83	Instansi

Pada pangkalan PSDKP Bitung Inovasi yang dihasilkan adalah “TUDE” Tumpuan Data Elektronik, tude merupakan inovasi media penyimpanan data berbasis cloud Google Drive yang dimanfaatkan untuk pengumpulan, pengarsipan dan konsolidasi data secara cepat, akurat dan terupdate. Pada tahun 2021 IKU ini tidak mendapatkan alokasi anggaran, namun dengan semangat dan kekompakan Tim GKT Pangkalan PSDKP Bitung dapat menyelesaikan perumusan sampai dengan implementasi TUDE dilingkungan internal PSDKP Bitung.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2021 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

IKU15 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Berdasarkan enam kriteria penilaian capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 adalah 95% dari target capaian IKU 72,5% sehingga capaian realisasi IKU ini adalah 120%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 13.068.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 12.997.400 atau 99,45%..

IKU16 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan PBJ merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ UPT Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berdasarkan empat kriteria penilaian capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan PBJ Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2021 adalah 83,75% dari target capaian IKU 72,5% sehingga capaian realisasi IKU ini adalah 115,52%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 350.000.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp 349.083.000 atau 99,74%.

IKU17 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

UKURAN :

Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:

- a. Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
- b. Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c. Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);

CARA MENGUKUR :

- a. Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran dokumen:
 - b. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun
 - c. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan
 - d. Renaksi Kinerja
 - a. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
 - b. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.
 - c. Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload

- minimal satu kali dalam triwulan berjalan.
- d. Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggungjawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
 - e. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
 - f. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV. Capaian IKU ini di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2021 adalah 100%, dari target 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 84%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 119,05%. Dan nilai rata-rata tahun 2021 adalah 99,50%. presentase capaian IKU 118,45%, jika dibandingkan dengan capaian IKU MP terstandar tahun 2020 capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah 72,5% dan capaian persentasenya adalah 88,41, mengalami kenaikan 30,04%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 11.327.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp.9.966.000,- atau 87,98%.

IKU18 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya (13 indikator kinerja) yaitu: 1) revisi DIPA; 2) deviasi RPD (Halaman III DIPA); 3) Pagu Minus; 4) Data Kontrak; 5) Pengelolaan UP dan TU; 6) Rekon LPJ Bendahara; 7) Dispensasi SPM; 8) penyerapan anggaran; 9) Penyelesaian Tagihan; 10) Konfirmasi Capaian Output; 11) retur SP2D; 12) perencanaan kas; 13) kesalahan SPM. Namun untuk tahun 2021 terdapat cacatan yaitu untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.

Capaian IKU nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2021 berdasarkan aplikasi MonevPA Kementerian Keuangan adalah 97,12 dengan persentase capaian 109,12% dari target 89. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 adalah 94,33 mengalami kenaikan sebesar 2,79 poin atau 1,93%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 16.280.000 dan realisasi tahun 2021 adalah Rp.16.279.400,- atau 99,99%.

rincian penilaian capaian IKPA pada website <https://spanint.kemenkeu.go.id/> sebagai berikut:

Tabel 24. Nilai IKPA dan NKA tahun 2021

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai akhir
Revisi DIPA	100	5	5
Deviasi halaman III DIPA	73,71	5	3,69
PAGU Minus	100	5	5
data kontrak	100	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	91	8	7,28
LPJ Bendahara	100	5	5
Dspensasi SPM	100	5	5
Penyerapan Anggaran	97,22	15	14,58
Penyelesaian Tagihan	100	10	10
Capaian Output	100	17	17
Retur SPPD	99,39	5	4,97
Renkas	0	0	0
Kesalahan SPM	95	5	4,5
Nilai Total	92,27		
Konversi Bobot	95%		
Nilai akhir (IKPA)	97,12		
Penyerapan Anggaran	96,96		
Konsistensi	98,81		
Capaian Keluaran	100		
Efisiensi	11,91		
Nilai EKA	93,71		

IKU19 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu (spanint.kemenkeu.go.id)

Capaian nilai NKA pangkalan PSKP Bitung tahun 2021 adalah 93,71 dan capaian persentasenya adalah 108,97%, dari target capaian 86. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat di bandingkan dengan capaian tahun 2020.

Berikut adalah hasil penilaian capaian IKU NKA pangkalan PSDKP Bitung pada website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Tabel 25. Nilai IKPA dan NKA tahun 2021

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai akhir
Revisi DIPA	100	5	5
Deviasi halaman III DIPA	73,71	5	3,69
PAGU Minus	100	5	5
data kontrak	100	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	91	8	7,28
LPJ Bendahara	100	5	5
Dspensasi SPM	100	5	5
Penyerapan Anggaran	97,22	15	14,58
Penyelesaian Tagihan	100	10	10
Capaian Output	100	17	17
Retur SPPD	99,39	5	4,97
Renkas	0	0	0
Kesalahan SPM	95	5	4,5
Nilai Total		92,27	
Konversi Bobot		95%	
Nilai akhir (IKPA)		97,12	
Penyerapan Anggaran		96,96	
Konsistensi		98,81	
Capaian Keluaran		100	
Efisiensi		11,91	
Nilai EKA		93,71	

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 adalah Rp. 34,493,848,000 realisasi anggaran tahun 2021 adalah Rp 33,444,301,242 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,96%.

Gambar 6. Grafik Alokasi Anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2021



Tabel 26. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

NO	Kode Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Realisasi	%
1	2350 Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.437.823.000	13.270.067.221	98.75
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	805.545.000	795.646.900	98.77
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	477.314.000	467.344.802	97.91
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	820.583.000	798.904.470	97.36
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.952.583.000	18.112.337.849	95.57
TOTAL		34.493.848.000	33.444.301.242	96,96

Dari data realisasi di atas, Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tertinggi ada pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351) dengan persentase penyerapan 98,77% dan realisasi anggaran terendah pada kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal PSDKP (2355) dengan persentase penyerapan 95,57%. Rendahnya realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal PSDKP (2355) disebabkan tidak terserapnya anggaran pada akun belanja pegawai, anggaran uang makan pegawai, biaya dan operasional perkantoran.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 105,75. Seluruh Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 dapat tercapai sesuai target dan persentase realisasi anggaran sebesar 96,96% dengan nilai total efisiensi adalah 11,91.

4.2. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2022, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang capaiannya belum maksimal, salah satu kegiatan yang harus ditingkatkan adalah penerapan penggunaan aplikasi SIMWASKAN dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SLO. Pada tahun 2021 pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dari 37 Satwas dan Wilker PSDKP masih ada 21 Wilker yang belum dapat melakukan pelayanan penerbitan SLO melalui SIMWASKAN dikarenakan kendala jaringan internet di beberapa lokasi.

Berdasarkan penanganan TPKP selama tahun 2021 dapat diketahui bahwa untuk kasus DF masih sangat marak, maka ditahun berikutnya kegiatan pencegahan dan kampanye serta edukasi tentang bahaya penggunaan alat tangkap yang merusak harus semakin masiv, selain itu penegakkan hukum terkait destructive fishing harus melibatkan penegak hukum dari instansi yang lain agar penegakkan hukum secara multidoor dapat menyentuh para pedagang/distributor pupuk yang disalah gunakan sebagai bahan baku perakitan bom ikan.

4.3. Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2022 secara terarah dan terukur, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Donny Muhamad Faisal**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Adin Nurawaluddin



Donny Muhamad Faisal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,42
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	7. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		8. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik	9. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		11. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75

“bekerja dengan integritas dan totalitas”

	12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	73
	13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
	14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
	15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
	16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
	17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	84
	18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
	19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	86

“bekerja dengan integritas dan totalitas”

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.437.823.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	805.545.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	477.314.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	820.583.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	18.952.583.000
Total		34.952.583.000

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny Muhamad Faisal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung